LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2025

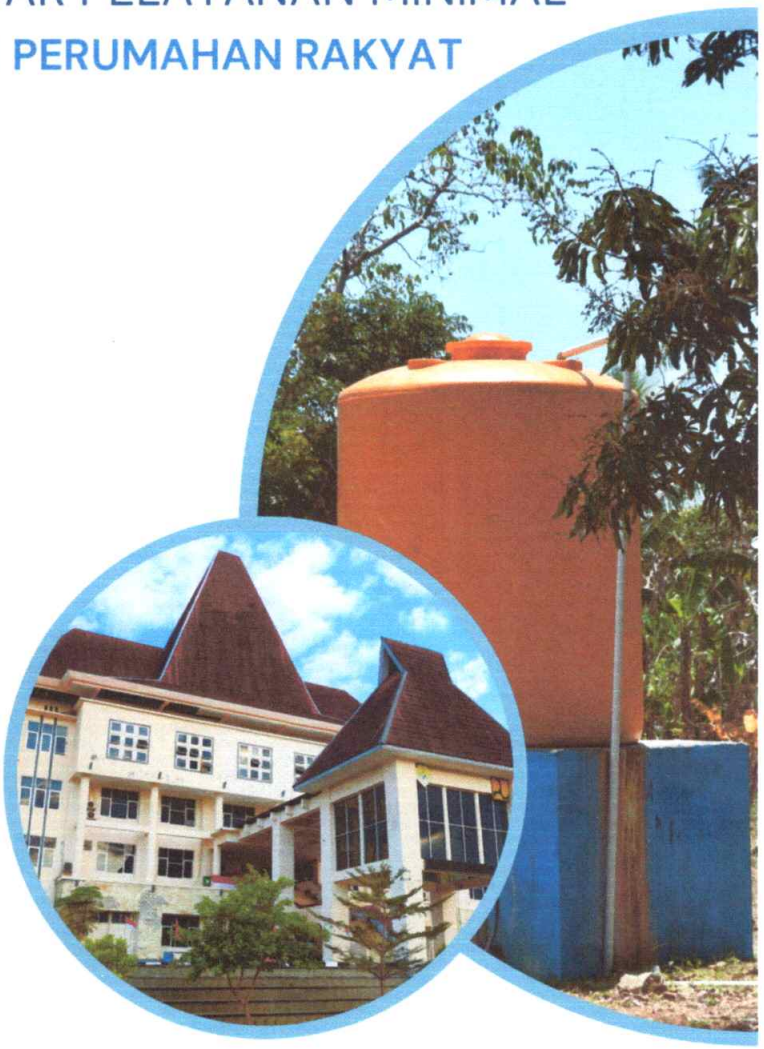

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | TA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertajam kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dokumen ini merupakan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan ini memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2025.

Dalam laporan ini, dijelaskan pelaksanaan SPM, capaian indikator layanan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akan dilakukan untuk mencapai target pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah strategis ke depan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kontribusi, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Demikianlah, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710428 199903 1 008

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	Latar Belakang	1
	Dasar Hukum	3
	Kebijakan Umum	4
	Arah Kebijakan	5
BAB II	**Penerapan SPM Pekerjaan Umum**	**7**
	SPM Pekerjaan Umum	7
	Pengumpulan Data	8
	Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	9
	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	31
BAB III	**Pencapaian SPM Pekerjaan Umum**	**35**
	SPM Bidang Pekerjaan Umum	**35**
	Jenis Pelayanan Dasar	35
	Target Pencapaian SPM	37
	Alokasi Anggaran	38
	Dukungan Personil	39
	Hasil Capaian	39
	Permasalahan dan Solusi	46
BAB IV	**Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum**	**49**
	SPM Bidang Pekerjaan Umum	49

BAB V **Penerapan SPM Perumahan Rakyat** **7**
SPM Perumahan Rakyat 51
Pengumpulan Data 53
Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar 58
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 62
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 63

BAB VI **Pencapaian SPM Perumahan Rakyat** **65**
SPM Perumahan Rakyat 65
Jenis Pelayanan Dasar 65
Target Pencapaian SPM 67
Alokasi Anggaran 70
Dukungan Personil 70
Hasil Capaian 71
Permasalahan dan Solusi 75

BAB VII **Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat** **78**
SPM Perumahan Rakyat 78

BAB VIII **Penutup** **81**
Kesimpulan 81
Saran 82

Lampiran Form Tahapan Penerapan SPM .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan SPM difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan, sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan pelayanan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Pada Pasal 1 butir 7, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pelayanan minimal bagi masyarakat. Permendagri ini menegaskan bahwa penerapan SPM dilakukan secara bertahap, terencana, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang belum memperoleh pelayanan dasar secara layak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Dinas PUPR Provinsi NTT berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Kondisi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berciri kepulauan dengan tingkat aksesibilitas yang beragam menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dasar. Oleh karena itu, penerapan SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kemampuan fiskal daerah, tanpa mengurangi pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Dalam rangka menjamin kesesuaian pelaksanaan pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pada Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Perumahan Rakyat.

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPM. Laporan ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban yang memuat capaian pelayanan dasar, identifikasi permasalahan dan kendala, serta upaya perbaikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Selain sebagai bahan evaluasi internal, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Penyampaian laporan dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengawasan internal dan eksternal, serta sebagai dasar perumusan kebijakan pelayanan dasar pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

merupakan bagian dari upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM;
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan SKIP untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- Perda Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. KEBIJAKAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Dinas teknis terkait erat dengan pelayanan publik di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum berupa Prasarana Sumber Daya Air, Kebinamargaan, serta Permukiman dan Penataan Ruang yang berbasis Penataan Ruang dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman yang andal.

D. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung kebijakan dimaksud maka dalam upaya penerapannya arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air;
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
4. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang Pekerjaan Umum;
5. Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif;
6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang profesional dan memadai;
7. Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa;
8. Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah;
9. Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman dan manual;
10. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur;
12. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni;
13. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas;
14. Mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas dan produktif;
15. Mewujudkan kegiatan pertanahan yang tertib, transparan dan akuntabel;
16. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/ air minum dan ketersediaan akses sanitasi yang layak dan sehat;

17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, tata bangunan dan lingkungan;
18. Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan;
19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam pemenuhan infrastuktur dasar, kualitas permukiman, sdm serta kualitas data dan informasi teknis

SPM PEKERJAAN UMUM

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

BAB II
PENERAPAN SPM PEKERJAAN UMUM

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk tingkat Provinsi mengacu kepada sasaran, indikator dan batas waktu pencapaian sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dilakukan dengan tahapan:

a. Pengumpulan Data
b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Tahapan Penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/ UPTD/ BADAN USAHA/ KP SPAM
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/ detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/ detik)	IDLE CAPACITY (liter/ detik)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KELURAHAN LASIANA	MATA AIR HITAM	KELURAHAN OESAPA	20 liter/detik	20 liter/detik	-	PDAM

SPM PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m^3/ hari)	KK	(m^3/ hari)	KK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KAB. / KOTA	KEC.	KEL./ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	JANTO N. SELAN	5371031701830008	4	1		1	
2	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	YAKOB ANDERIAS SORE	5371030905850001	10	1		1	
3	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	33	NIXON MAXI NDOLU	5371030411840009	5	1		1	
4	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	YULIUS BAYU NDAPA	5371032806690001	9	1		1	

5	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	PITER ESTON LENAMAH	5371031107890004	4	1		1	
6	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ALVARO CHRISTOMOS	5303051609870002	5		1	1	
7	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ANDERIAS BILI ROTO	5371031206780010	8	1		1	
8	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ALEXANDER LAKE	5371031505660001	4	1		1	
9	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	GUSTAF NOME	5371031811720006	6	1		1	
10	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	HERIMUS TALAN	5371032412740003	6	1		1	

11	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	JONISUS MISSA	5371032606790008	6	1		1	
12	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	POLYCARPUS TEFA	5371032610750004	6	1		1	
13	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	YAKOBUS TOTO	5371020406840007	4	1		1	
14	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	33	GABRIEL ABI	5371030202690003	7		1	1	
15	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	YONLIF HENUKH	5371031303910008	4	1		1	
16	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	SIMON SUY	5371032103650001	5	1		1	

17	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	YAKOB FANGGIDAE	5371030512850000	6	1		1	
18	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ARNOLDUS DON	5371030312610000	5	1		1	
19	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	OMRIS SOINBALA	5302101310870001	4	1		1	
20	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	YULIANA TAGO	5312124504780003	5	1		1	
21	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	33	MARTEN TANONO	5371030503740003	8	1		1	
22	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	FIKTOR SNAE	5371031810820002	5	1		1	

23	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	SILVESTER LALUS	5371031511650001	8	1		1	
24	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	ALAN FAISAL	5371030606840017	4	1		1	
25	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	3	FAREDRIK NGGEON	5371031802670001	6	1		1	
26	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	SAMUEL NGGEON	5371036201930001	4	1		1	
27	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	DICKY A. KAREL	5371032811860006	5	1		1	
28	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	IBRAHIM PELANDOU	5371032404720008	5	1		1	

29	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	PAULUS BANIK	5371032908600001	7	1		1	
30	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	HENGKI A. LEDOH	5371041507770009	4	1		1	
31	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	AGUSTINO JOSE	5371031408840000	4	1		1	
32	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	SILVESTER TAEL	5371031304640003	6	1		1	
33	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	NIKODEMUS ADU	5371031612640001	9	1		1	
34	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	YUNUS BENU	5371032505420001	4	1		1	

35	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	YOHANES MBAU	5371032506750006	5	1		1	
36	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	YUS YONATAN MBAU	5371030907820005	4	1		1	
37	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	NATAN MANUBULU	5302201311780001	4	1		1	
38	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	ANDERIAS NDOLU	5371030404600002	3	1		1	
39	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	BOBBY D. NDOLU	5371030912860004	5	1		1	
40	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	JHONY B. MANU	5371031607830000	4	1		1	

41	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	26	VICKY ARYANTO NDUN	5371030803940001	5	1		1	
42	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	27	WEMPI NELSON BUSU	5371032012790005	7	1		1	
43	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	ANGELINA OKI	5371032202860013	5		1	1	
44	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	GODLIF NEKEN	5371030311850000	4	1		1	
45	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	JASMIN DETHAN	5371404802231289	3		1	1	
46	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	CHRISTOFEL LITIK	5371032312590001	4	1		1	

47	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	RAFAEL NDUN	5371402409223668	6		1	1	
48	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	SAMWEL PETRA HANAS	5371035808900009	6		1	1	
49	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	DANIEL NDUN	5371031406800006	6	1		1	
50	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	YOHAN ROBINSON SUEK	5371032706800010	5	1		1	
51	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	10	4	SOLEMAN MANBAIT	5371032709650001	5	1		1	
52	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	MARTINUS TAOPAN	5371031505760002	6	1		1	

53	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	8	ELIAS MESSAKH	5371011201600001	7	1		1	
54	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	12	SERLA TAOPAN	5302011911870002	5		1	1	
55	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	9	SALIKA M. ANUNUT	5371032303820006	3		1	1	
56	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	13	39	INTO ANIN	5371031408800003	5		1	1	
57	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	ELIASAR BENU	5371032404660002	5	1		1	
58	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	LUSIA FOUK	5371036710670009	6	1		1	

59	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	DIKI KAREL	5371032206780006	4	1		1	
60	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	KLEMENS BERE NAHAK	5371030907770000	5		1	1	
61	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	FELENSIA BANA	5371405402218807	11	1		1	
62	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	JEANE MERIASVIN UKAT	5371042405910002	4		1	1	
63	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	JOHANSEN HELY	5371036907820003	3		1	1	
64	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	ALBERTO A. TEME	5371030202780003	8		1	1	

65	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	STELA BAUNSELE	5371032701790009	6		1	1	
66	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	10	15	MARIA FATIMA KALISTA KOA	5371032906710005	7		1	1	
67	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	DAUD LANMANI	5371033010710003	4	1		1	
68	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	EXEL J. ATAUPAH	5371404107221635	6		1	1	
69	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	11	14	JULIANTO M. TIMBUDONA	5371033112810015	5		1	1	
70	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	BERTI WAANG	5371032810880001	6		1	1	

71	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	DANIEL BILIU	5371032206620000	5	1		1	
72	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	ISMI KAMILA ALHUMAIRA	3322060109900001	5		1	1	
73	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	12	RAFLESIA ROHI MOLA	5371031108880002	5		1	1	
74	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	12	SILVIANA BRISIA EIREN	5371406211239543	6	1		1	
75	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	3	DOMINIKUS KIA IRI	5371032512690002	9		1	1	
76	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	6	24	SEPRIYANTO BILY	5371041009670004	6		1	1	

77	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	JONATHAN NAHAK	5371032706730003	9		1	1	
78	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	REYNARD GAVI KASE	5371030505760015	5		1	1	
79	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	4	LUKMAN A. BURHAN	5371031812990001	5	1		1	
80	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	MARSELINA SOLUK UTAN	5371036204890003	4	1		1	
81	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	MARSELO BELO	5301086907880001	4		1	1	
82	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	VALENTINUS MAU/ROSALINDA MAKENA	5371034909680002	6	1		1	

83	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	ROSINA BINSASI	5371035110760001	7	1		1	
84	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	KRESENSIANA KOTILDIS	5371036704680001	4	1		1	
85	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	SUSANA ADU	5371035501580000	3	1		1	
86	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	5	19	FALDI LIU	5371030101680002	6		1	1	
87	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	5	19	ALEXANDER NDUN	5371030805830000	5	1		1	
88	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	BONNY BENYAMIN SABA	5371030504810005	6	1		1	

89	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	ELANORA SERAN	5371031401940003	6		1	1	
90	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	CALTIN CARISA RIWU	5371406603239830	6		1	1	
91	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	YOHANIS SELAN	5371031406650003	6	1		1	
92	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	FRANS KALE TUKA	5371031404570002	4	1		1	
93	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	STEFANUS BAU SERAN	5371030205630004	8	1		1	
94	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	SOLEMAN BONBITI	5371031808560001	2	1		1	

95	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	TONI TANIU	5371030603800004	7	1		1	
96	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	MARTINUS PAINEON	5371036108830005	6	1		1	
97	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	ANTONIUS KOPONG HAYONG	5371031011790012	4	1		1	
98	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	DIANA NOVITA MONE KE	5371034811790006	4	1		1	
99	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	CRISTIANO A. OBE	5371401712211257	7		1	1	
100	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	GEVARIEL SOLU	5371402602237201	4		1	1	

101	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	MARTEN NENOLIU	5371030310700000	5	1		1	
102	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	GABRIEL KLAU	5371032704570000	4	1		1	
103	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	GLYCESIA MANEK	5371406408227468	3		1	1	
104	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	31	EMPI ELIASER TANEO	5371031005910004	3	1		1	
105	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	31	GRASANTI MONE/LAZARUS MONE	5302150511880001	4		1	1	
106	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	AMOS SERAN	5371030404740018	6	1		1	

107	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	HERMANUS MAU BELE	5371030904760001	6	1		1	
108	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	3	ANSELMUS NAHAS	5371036011950003	5	1		1	
109	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	HERRY JONI MESSAKH	5371031306630004	5	1		1	
110	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	YULIUS BILI	5371032306910000	5	1		1	
111	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	AXEL J. FALLO	5371401503234051	4		1	1	
112	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	34	YUSUF ATTY	5371030407660003	6	1		1	

113	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	NALDI I.R.ADU	5371041311780013	5	1		1	
114	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	9	MATEOS ADU	5371030909780012	6	1		1	
115	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	31	APLONIUS LIU	5371031804770003	5	1		1	
TOTAL									**615**	**82**	**33**	**115**	

SPM PEKERJAAN UMUM

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KAB./ KOTA	KEC.	KEL./ DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL															

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	0,567	%	Kelurahan Lasiana	Rp. 1.100.000.000	Dinas PUPR Provinsi NTT
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	0,567	%	Kelurahan Lasiana	Rp. 1.100.000.000	Dinas PUPR Provinsi NTT

SPM PEKERJAAN UMUM

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							

BAB III
PENCAPAIAN SPM PEKERJAAN UMUM

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum pada tingkat Provinsi dilaksanakan dengan mengacu pada jenis pelayanan dasar, indikator, serta tahapan penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pengukuran tingkat pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dilakukan melalui penghitungan Indeks Pencapaian SPM. Indeks tersebut disusun untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar, yang mencakup capaian jumlah penerima layanan dasar serta capaian mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan *Indeks Pencapaian SPM* yang meliputi:

a. Capaian Penerima Layanan Dasar; dan
b. Capaian Mutu Pelayanan Dasar

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

IP_{SPM} = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sebagai salah satu Dinas Pengampu SPM Provinsi yaitu SPM Pekerjaan Umum, wajib menyampaikan Laporan Penerapan SPM sebagai berikut:

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* dengan indikator *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota*

  Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota

- *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*, dengan indikator *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*

  Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

2. Target Pencapaian SPM

a. Target dan Indikator SPM

TARGET DAN INDIKATOR PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

Sumber data : Permendagri 59 Tahun 2021

3. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengalokasikan anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya. Alokasi anggaran tersebut direncanakan dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rincian program dan kegiatan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

   Rincian program/ kegiatan untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* sebagai berikut :

   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.909.033.500,- dan realisasi keuangan Rp. 707.487.056,- atau sebesar 77,83%.
   - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman; Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan Nama Paket : Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.097.961.490,- atau sebesar 99,81%.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota

   Pada Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat program/kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah

Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan layanan tersebut belum dapat dilaksanakan.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* dan *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 80 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Bidang Cipta Karya

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	CPNS	PPPK	Total	Keterangan
1	Cipta Karya	21	16	43	80	

Sumber Data : Bidang CK

5. Hasil Capaian

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, serta pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Curah lintas kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal, khususnya dalam menjamin ketersediaan layanan air minum lintas wilayah secara berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2025, belum terdapat kegiatan yang secara spesifik mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Namun demikian, pada tahun yang sama dilaksanakan kegiatan *Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan di Kota Kupang (Kelurahan Lasiana)* yang melayani sebanyak 115 KK. Kegiatan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum karena bukan merupakan SPAM Lintas Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada Aplikasi e-SPM dipilih opsi **"Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota"**, yang mencerminkan belum terlaksananya program/kegiatan pendukung capaian SPM pada tahun dimaksud. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan SPM. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memfokuskan upaya pada tahap perencanaan, guna memastikan tersusunnya rencana yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya.

Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya poin C butir 2 sebagaimana tercantum pada halaman 288, ditegaskan bahwa, *Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar*, maka nilai pencapaian SPM ditetapkan sebesar 100. Oleh karena itu, capaian SPM untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota adalah sebesar ***100%.***

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Pada Tahun 2025, pelayanan dasar untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota, yang diukur melalui indikator Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota, belum dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga belum memungkinkan dilaksanakannya program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan indikator SPM dimaksud pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dalam Aplikasi e-SPM dipilih opsi **"Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota"**, yang mencerminkan bahwa pada tahun berjalan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan.

Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya poin C butir 2 sebagaimana tercantum pada halaman 288, ditegaskan bahwa, *Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar*, maka nilai pencapaian SPM ditetapkan sebesar 100. Oleh karena itu, capaian SPM untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota adalah sebesar ***100%.***

3. Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu:

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

   Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian

mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

   Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar yang dikalikan dengan bobot mutu, serta persentase indeks penerima layanan dasar yang dikalikan dengan bobot penerima. Berdasarkan hasil penghitungan pada Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri, Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar **100%** dengan kategori **"Pencatatan Saja"**.

PENCAPAIAN PENERAPAN SPM PEKERJAAN UMUM PADA APLIKASI E-SPM DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

GRAFIK PENERAPAN SPM TABEL PENERAPAN SPM 4 TAHAPAN SPM

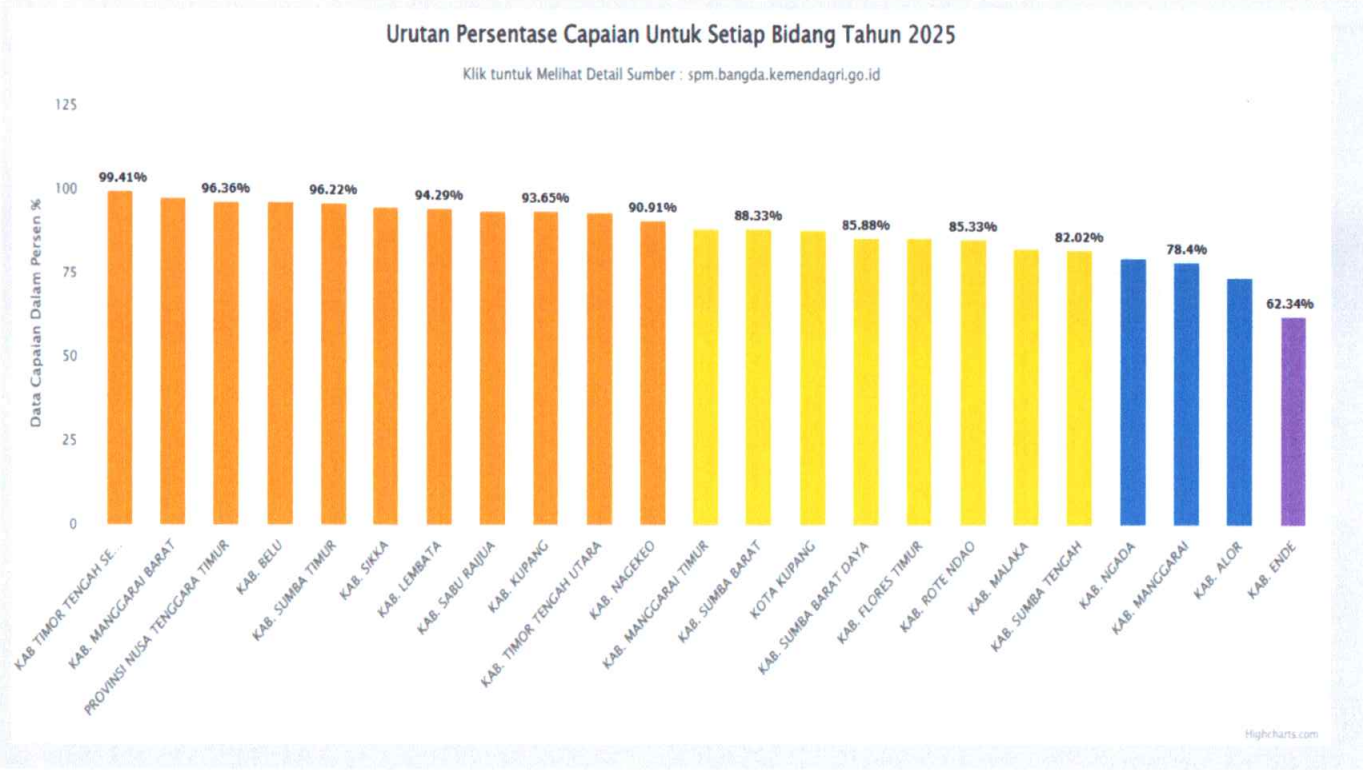

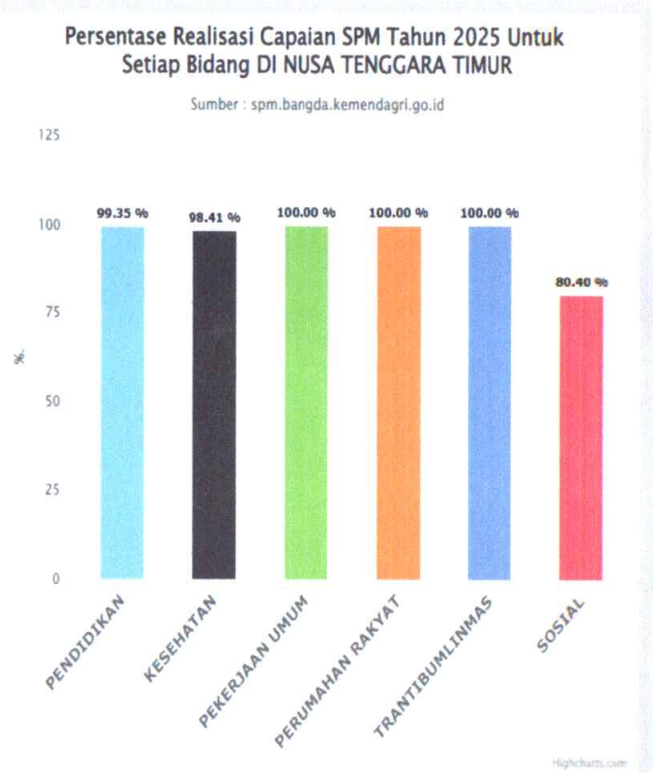

spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/5300/6/2025

Capaian SPM | Kegiatan dan Anggaran SPM | Permasalahan

PRINT DATA CAPAIAN

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota) Tidak Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				(100%)	100.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00 %	
	1 . Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00 %	
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota *Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)*	Jumlah Kab/Kota	22	22	0	100.00 %	
	3 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
	1.PENDATAAN					100.00 %	
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					100 %	
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					100 %	
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					100 %	
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					100 %	
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					100 %	
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					100 %	
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota) Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				(100%)	100.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota					100.00 %	

spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/5300/6/2025

	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota *Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)*	Jumlah Kab/Kota	22	22	0	100.00 %	
	3 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			**100.00 %**	
	1.PENDATAAN					**100.00 %**	
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					**100 %**	
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					**100 %**	
	2.PERHITUNGAN					**100.00 %**	
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					**100 %**	
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					**100 %**	
	3.PERENCANAAN					**100.00 %**	
	FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					**100 %**	
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					**100 %**	
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota) Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				(100%)	**100.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					**100.00 %**	
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota					**100.00 %**	
	1 . Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	**100.00 %**	
	2 . Rekapitulasi SPAM Kab/Kota *Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)*	Jumlah Kab/Kota	22	22	0	**100.00 %**	
	3 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			**100.00 %**	
	1.PENDATAAN					**100.00 %**	
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					**100 %**	
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					**100 %**	
	2.PERHITUNGAN					**100.00 %**	
	FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL					**100 %**	
	FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL					**100 %**	
	3.PERENCANAAN					**100.00 %**	
	FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI					**100 %**	
	FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK					**100 %**	

6. Permasalahan dan Solusi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diterapkan sejak beberapa tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam implementasinya masih diperhadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan, baik yang bersumber dari internal Dinas maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap capaian SPM setiap tahunnya.

Identifikasi berbagai pemasalahan beserta solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini :

TABEL 6.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	- Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kegiatan hanya dapat difokuskan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Sebagai solusi sementara, kegiatan difokuskan pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun bersifat komprehensif dan tepat sasaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Dengan Kondisi Fiskal daerah yang ada maka alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota pada Dinas PUPR Provinsi NTT tidak dapat dianggarkan sehingga tidak terdapat kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota di Tahun anggaran 2025.	

Sumber Data: Dinas PUPR Provinsi NTT

TABEL 6.2. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Masalah	Masalah	Tindak Lanjut/ Solusi
I	Data Dasar	Data dasar yang tersedia saat ini belum memadai dan tidak diperbarui secara berkala, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam perencanaan dan evaluasi program. Kurangnya data yang akurat dan terkini dapat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta mengurangi efektivitas program yang dijalankan.	Solusi yang diperlukan adalah meningkatkan upaya pengumpulan dan pembaruan data secara berkala sesuai dengan kebutuhan layanan dasar.
2	Indikator	Perlu ditingkatkan upaya pengumpulan data secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan layanan dasar	Perlu disusun Road Map SPALD sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan SPALD Regional
3	Penetapan Target SPM	Karakteristik pulau yang berbeda (berbukit-bukit dan curah hujan yang tidak pasti) menyulitkan daerah untuk menetapkan target dan indikator mengacu kepada target nasional	Koordinasi dengan Dinas Pengampu terkait penetapan target riil
4	Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan	Tidak semua indikator dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah	Adanya komitmen antara Dinas Pengampu dengan Kepala Daerah
5	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih ada yang belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM	Penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM

BAB IV
PROGRAM & KEGIATAN
SPM PEKERJAAN UMUM

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan dan Dukungan Dana
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp. 909.033.500,-
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan *Nama Paket : Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang* Rp. 1.100.000.000,-

Sumber Data: DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT TA. 2025 dan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi NTT TA. 2025

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa dalam 2 (Dua) jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum terakumulasi dalam program/ kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

   Pada Tahun Anggaran 2025, belum terdapat kegiatan yang secara spesifik mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Namun demikian, pada tahun yang sama dilaksanakan kegiatan *Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan di Kota Kupang (Kelurahan Lasiana)* yang melayani sebanyak 115 KK. Kegiatan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum karena bukan merupakan SPAM Lintas Kabupaten/Kota. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.909.033.500,- dan realisasi keuangan Rp. 707.487.056,-.
   - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman; Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan Nama Paket : Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.097.961.490,-.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

   Pada Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat program/kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan layanan tersebut belum dapat dilaksanakan.

SPM PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2025

BAB V

PENERAPAN SPM PERUMAHAN RAKYAT

B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, pelaksanaan tahapan pertama yang dilaksanakan dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM pada bidang Perumahan Rakyat yaitu Pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan baseline data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi.

Hal ini tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Data yang berhasil dihimpun pada tahun 2025 terkait pelayanan dasar yaitu data identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi, dan data rumah yang terkena bencana Provinsi.

Berkaitan dengan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Pengampu SPM, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Rencana Aksi terdapat 2 indikator utama pelayanan dasar bidang Perumahan, salah satunya Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana. Terdapat 4 jenis layanan yang harus dipenuhi. Berdasarkan Renaksi Perumahan yang telah dipergubkan dan terkendala fiskal daerah, maka Dinas PUPR hanya menganggarkan untuk 1 jenis layanan saja yaitu Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Pada kegiatan ini juga, yang

dapat dilakukan masih pada tahap identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan rumah yang terkena bencana Provinsi.

2. Pada tahun 2025 terdapat SK Bencana Provinsi dari Kepala Daerah terkait bencana letusan Gunung Lewotobi. Akan tetapi terkendala pada kondisi fiskal daerah, sehingga penanganan bencana ini diambil alih oleh Kementerian Perumahan.

3. Oleh karena belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga pada tahun anggaran 2025 dana rehabilitasi rumah ini dianggarkan senilai 600 juta untuk sub kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan di enam kabupaten. Terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban Relokasi Program Pemerintah, sampai dengan saat ini belum ada Program Pemerintah yang berakibat pada relokasi, sehingga tidak ada penganggarannya.

Tahapan Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang /tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Banjir												
		Tinggi	Alor										
				Alor Barat Laut									
					Desa Aimoli								
					Desa Alaang								
					Alila								
					Alila Selatan								
					Alor Besar								
					Alor Kecil								
					Ampera								
					Bampalola								
					Dulolong								
					Dulolong Barat								
					Hulnani								
					Lefokisu								
					Lewalu								
					O A Mate								
					Otvai								
					Pulau Buaya								
					Ternate								
					Ternate Selatan								
					Kelurahan Adang								
				Alor Barat Daya									
					Halerman								
					Kafelulang								
					Kuifana								
					Manatang								
					Margeta								
					Moramam								

Data terkait Form 4. A. 1 yang seterusnya terlampir.

FORM 4. A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Alor					AKAN BERSURAT KE KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGECEK LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
2	Belu					
3	Ende					
4	Flores Timur					
5	Kab. Kupang					
6	Lembata					
7	Malaka					
8	Manggarai					
9	Manggarai Barat					
10	Manggarai Timur					
11	Nagekeo					
12	Ngada					
13	Rote Ndao					
14	Sabu Raijua					
15	Sikka					
16	Sumba Barat					
17	Sumba Barat Daya					
18	Sumba Tengah					
19	Sumba Timur					
20	TTS					
21	TTU					
22	Kota Kupang					

FORM 4. A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KETERANGAN
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjir Bandang	2021	Belu	Raimanuk	23	2	7	14	23			
				Kakuluk Mesak	2	0	1	1	2			
				Nanaet Duabesi	1	0	0	1	1			
				Lamaknen Selatan	5	0	5	0	5			
				Kota Atambua	5	0	0	5	5			
				Tasifeto Barat	2	0	1	1	2			
2	Banjir Bandang	2023	Belu	Atambua Barat	8	6	1	1	8			
				Kota Atambua	10	1	2	7	10			
				Tasifeto Timur	7	0	1	6	7			
				Lamaknen Selatan	129	46	21	62	129			
				Lamaknen	24	10	3	11	24			
3	Siklon Tropis Seroja	2021	Flores Timur	Kluba Golit	5	3	1	1	5			
				Adonara Barat	31	15	3	13	31			
				Adonara	18	0	0	18	18			
				Adonara Tengah	7	5	1	1	7			
				Wotan Ulumado	6	4	1	1	6			
				Ile Boleng	32	15	1	16	32			
				Adonara Timur	54	40	6	8	54			
4	Banjir Bandang, Tanah Longsor, ROB dan Angin Kencang	2021	Flores Timur	Ile Boleng	55	0	0	55	55			
				Adonara Timur	188	0	0	188	188			
				Wotan Ulumado	50	0	0	50	50			
5	Erupsi Gunung Lewtobi Laki-laki	2024	Flores Timur	Wulang Gitang	1159	274	0	885	1159			
				Ilebura	794	0	0	794	794			
6	Banjir Bandang	2021	Lembata	Ile Ape	354	112	91	151	354			
				Ile Ape Timur	120	50	2	68	120			
				Omesuri	74	46	6	22	74			
				Buyasuri	46	12	9	25	46			
				Lebatukan	70	35	11	24	70			
7	Banjir Rob	2025	Sikka	Alok	67	64	0	3	67			
8	Banjir	2025	Sikka	Magepanda	26	26	0	0	26			
9	Banjir & Longsor	2025	TTU	Noemuti	112	105	0	7	112			
10	Longsor (Tanah Gera	2025	TTU	Noemuti Timur	13	4	0	9	13			
11	Banjir	2025	Kab. Kupang	Fatuleu Barat	54	32	8	14	54			
12	Longsor	2023 & 2025	Kab. Kupang	Takari	9	0	0	9	9			

FORM 4. A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	KAWASAN PEMGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)		KETERANGAN
		KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA				MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												BELUM ADA PROGRAM PROVINSI YANG MENGAKIBATKAN RELOKASI
Total *)												

FORM 4. A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 Ha)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/ sedang/ berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Timor Tengah Selatan	Kota Soe	Nonohonis RT.004/RW.007	13,96	80	-	Ringan	-
2	Timor Tengah Selatan	Kota Soe	Nonohonis RT.020/RW.002	10,73	39		Ringan	

FORM 4. A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha														
3	Pengembangan perumahan baru skla besar melalui penyediaan akses														
Total *)															

2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. B. 1 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM	KETERANGAN
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/PEMBANGUNAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Total *)																										

FORM 4. B. 2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*		*3*	*4*	*5*
A.	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)	
	1.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
			1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang *Hari	
			2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang *Hari	
			Survei Primer	Rp (Sub Total)	
			1. Pemetaan	Orang *Hari	
	2.	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
			1. Data Aset lahan Pemda	Orang *Hari	
			2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang *Hari	
			Survei Primer	Rp (Sub Total)	
			1. Pemetaan	Orang *Hari	
	3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelum yang belum tertangani	Rp (Sub Total)	
	4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi			Rp (Sub Total)	
	1.	Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang *Kali	
			Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
			ATK	LS	
			Narasumber	Orang *Kali	
C.	Pembentukan Tim Satgas			Rp (Biaya C1)	
	1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
			ATK	LS	
			Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	

Data terkait Form 4. B. 2 yang seterusnya terlampir.

FORM 4. B. 5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M^2)	LUAS TANAH (M^2)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			KETERANGAN
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																					
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha																					
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses																					
Total *)																						

FORM 4. B. 6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1.	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)	
	1.	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survei Sekunder :		
			Pengadaan peta	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	2.	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survei Sekunder :		
			Pengadaan peta	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	3.	Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun Umum dan atau Rumah Khusus Eksisting	Survei Sekunder :		
			Koordinasi dengan Instansi terkait (PTSP)	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	4.	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:		
			Tenaga Ahli Geografi/ Geodesi	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Statistik	Orang *Bulan	
2.	Sinkronisasi Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota				
	1.	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Singkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		
			Paket Meeting	Orang *Kali	
	2.	Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket Meeting	Orang *Kali	

Data terkait Form 4. B. 6 yang seterusnya terlampir.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. C. 1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									KETERANGAN
				TAHUN KE-1			TAHUN KE- 2			TAHUN KE- 3			
				ABPD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan Kembali												
3	Penyediaan Rumah Relokasi												
	a. Pengadaan Lahan												
	b. Pembangunan Baru												
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana												
Jumlah *)													

FORM 4. C. 3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN			KETERANGAN
				TAHUN N + 1			
				ABPD	DAK	LAINNYA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						
2	Penyediaan rumah Layak Huni						
Jumlah *)							

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. D. 1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN - N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI					KETERANGAN
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Total *)																	
Persentase Layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

FORM 4. D. 3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN - N
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)												
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha												
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses												
Total *)													
Persentase Layanan **)													
Capaian SPM Total ***)													

BAB VI
PENCAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT

B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilaksanakan melalui:

a. rehabilitasi rumah;

b. pembangunan kembali rumah;

c. pemukiman kembali; atau

d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilakukan dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat Keputusan Penetapan bencana dari Gubernur;
3. Dampak bencana di daerah administrasi Provinsi.

2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

a. Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau

b. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

a. Terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan

b. Sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap dapat dihitung capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:

a. Penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);

b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan

c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.

Program Pemerintah Daerah sebagaimana dilaksanakan dalam rangka:

a. Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;

b. Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;

d. Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau

e. Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:

a. sempadan sungai;

b. sempadan pantai;

c. sempadan rel kereta api;

d. daerah saluran SUTET; dan/atau

e. daerah berpotensi bahaya lainnya.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang meperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

Sumber data : Permendagri 59 Tahun 2021

Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang meperoleh rumah layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, kategori Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	

Sumber data : Aplikasi e-SPM

3. Alokasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT pada tahun 2025 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT sebesar Rp. 193.368.808.591,- yang diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2025 yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Pemerintah Provinsi dengan Total Pagu Rp. 1.252.873.420,-. Dari total anggaran ini, senilai Rp. 600.000.000,- dialokasikan untuk sub kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sikka, kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu. Sisa pagu anggaran senilai Rp. 652.873.420.- diperuntukan pada kegiatan pendukung terkait Identifikasi perumahan bagi korban bencana dengan target 6 Kabupaten.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 73 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Kondisi Pegawai Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	23 Orang
2	CPNS	18 Orang
3	PPPK	32 Orang
	Jumlah	**73 Orang**

Sumber data : Data Bidang Perumahan & Permukiman

5. Hasil Capaian

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025 maka diperoleh hasil pencapaian yang dapat di sampaikan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan

Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
		Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	0	0	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi	0	0	100	100

Sumber data : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat Pada Aplikasi e-SPM

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa tidak ada realisasi dalam pencapaian penerima layanan dasar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bencana yang terjadi di Provinsi NTT sehingga tidak ditargetkan untuk rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Demikian pula halnya dengan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Dengan tidak adanya kedua jenis pelayanan tersebut baik target maupun realisasi maka dianggap pencapaiannya 100%.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat ketentuan untuk melaksanakan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat Keputusan Penetapan bencana dari Gubernur;
3. Dampak bencana di daerah administrasi Provinsi

Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam melaksanakan jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat maka pada realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025.

Berkaitan dengan kewajiban untuk mengoptimalisasikan layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat maka SPM Bidang Perumahan Rakyat telah memprogramkan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp. 1.252.873.420,- yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Pemerintah Provinsi. Dari total anggaran ini, senilai Rp. 600.000.000,- dialokasikan untuk sub kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sikka, kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu. Sisa pagu anggaran senilai Rp. 652.873.420.- diperuntukan pada kegiatan pendukung terkait Identifikasi perumahan bagi korban bencana dengan target 6 Kabupaten.

Terkait dengan ketiadaan kegiatan tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah *'Tidak Terjadi Bencana'*. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan yang menyatakan bahwa pada Tahun

2025, Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* (form terlampir).

Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Mutu Minimal Layanan Dasar *(opsi : 'Tidak Terjadi Bencana')*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal			Total Capaian (%)
		Target	Realisasi	80%	Target	Realisasi	20%	
1	*2*	*3*	*4*	*5=4*80 %*	*6*	*7*	*8=7*20 %*	*9=5+8*
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	-	100	80	-	100	20	100

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu capaian 100% dengan kriteria ***TUNTAS PARIPURNA.***

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi/ Kabupaten dan Kota maka pemerintah terus berupaya untuk menyediakan / membangun sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerataan ini dapat berakibat pada pemanfaatan wilayah sampai pada daerah atau wilayah permukiman masyarakat sesuai prioritas kebutuhan pembangunan

sehingga perlu dilakukan penggantian lahan dan relokasi pemukiman bagi warga yang berada dalam wilayah yang diintervensi oleh kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.

Terkait dengan relokasi permukiman warga sebagai akibat adanya program pemerintah dalam wilayah permukiman masyarakat perlu kami informasikan juga sepanjang tahun 2025 tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.

Berkaitan dengan ketiadaan program pemerintah yang berakibat pada relokasi tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah *'Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah'*. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2025 Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* (form tahapan terlampir).

Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Mutu Minimal Layanan Dasar *(opsi : 'Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah')*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal			Total Capaian (%)
		Target	Realisasi	80%	Target	Realisasi	20%	
1	*2*	*3*	*4*	*5=4*80 %*	*6*	*7*	*8=7*20 %*	*9=5+8*
1	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	-	100	80	-	100	20	100

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima

layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu capaian 100% dengan kriteria ***TUNTAS PARIPURNA***.

3. Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu :

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

   Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

   Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja

Indeks pencapaian SPM (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima, sehingga Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat adalah 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1. Ada SK bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, namun karena kondisi keterbatasan fiskal daerah sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun tetap dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana; 2. Belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga belum ada sasaran pasti.	1. Pemenuhan data dasar pemenuhan layanan SPM perlu adanya kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah Terkait dengan pihak Kabupaten, Kelurahan atau pihak lainnya agar bisa memperoleh data dasar yang lebih efektif dan efisien dalam penganggaran; 2. Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun berikutnya.
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Layanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah memerlukan perencanaan daerah jangka panjang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi NTT, sehingga dalam hal pemenuhannya memerlukan singkronisasi program terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan;	Apabila terdapat Rencana Penyelenggaraan Relokasi Di Provinsi NTT Sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah agar pemenuhan layanan SPMnya dapat dilaksanakan.

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT

Pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* pada SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2025 belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fiskal daerah sehingga pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan Renaksi Perumahan yang telah dipergubkan. Selain itu, belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga belum ada sasaran pasti, sehingga Dinas PUPR juga mengalokasikan senilai Rp. 600.000.000,- untuk kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan yang berfokus pada 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sikka, Flores Timur, Lembata, Kabupaten Kupang, TTU, dan Belu.

Dengan demikian, semua tahapan yang berkaitan dengan proses pelaporan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, mulai dari tahap Pengumpulan Data sampai dengan tahap Pelaksanaan Penerapan SPM belum dilakukan secara optimal dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ketersediaan anggaran.

Pentingnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal perumahan yang layak huni tidak terbantahkan. Namun, terkendalanya pelaksanaan pemenuhan SPM ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menyediakan layanan yang memadai. Sebagai akibatnya, kualitas dan kuantitas layanan yang seharusnya tersedia untuk masyarakat terdampak tidak dapat mencapai target yang diharapkan.

BAB VII
PROGRAM & KEGIATAN
SPM PERUMAHAN RAKYAT

APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 diketahui sebesar Rp. 5,219,986,855,755,- sedangkan Alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Pemerintah Provinsi Sub Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp. 600.000.000,-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada Program Pemerintah yang berdampak pada Relokasi sehingga tidak tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dan juga seluruh kegiatan yang mencakup tahapan penerapan dan pencapaian SPM	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	

Sumber Data : DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT TA. 2025

Dilihat dari tabel diatas, alokasi anggaran penerapan SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp. 600.000.000,-, jika dihitung hanya sebesar 0,20% dari APBD Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp 5,219,986,855,755,- Tahun 2025. Jumlah ini relatif kecil untuk anggaran penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat, akan tetapi dikarenakan tidak adanya Bencana Tingkat Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah, anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk melakukan tahapan pendataan.

1. **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi**

   Penanganan kegiatan pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dengan indikator *Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni* pada Tahun Anggaran 2025 belum dapat terlaksana oleh karena kewenangan dalam menangani bencana Provinsi ini harus ada SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, sehingga kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana karena tidak ada bencana yg berskala Provinsi, dan capaiannya juga tidak dapat terhitung.

   Pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* adalah indikator yang sifatnya prediktif sehingga tidak pasti kapan akan terjadi. Oleh karena itu, perencanaan dan kegiatan yang dilakukan bersifat antisipatif dan pelaksanaannya akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor sesuai kewenangan. Sejauh ini belum pernah ada penanganan terkait indikator ini.

2. **Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**

   Pada Tahun Anggaran 2025, belum ada program pemerintah yang berdampak pada relokasi karena belum tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* dengan indikator *Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang*

memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, sehingga capaiannya tidak dapat terhitung.

Layanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah memerlukan perencanaan daerah jangka panjang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi NTT, sehingga dalam hal pemenuhannya memerlukan singkronisasi program terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan.

BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian. Dalam proses ini, prioritas utama adalah memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan SPM sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.

Keberhasilan penerapan SPM tidak hanya bergantung pada peran Pemerintah Daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

Capaian target SPM harus selaras dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang mengacu pada kebijakan nasional. Hingga saat ini, implementasi SPM di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjalan sesuai standar dan indikator yang diatur dalam Permen PU Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi SPM, Pemerintah Daerah bersama Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, serta unsur SKPD yang membidangi perencanaan dan keuangan, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang tepat guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat semakin optimal.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pembina perlu memperkuat dukungan pendanaan pelaksanaan SPM kepada daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dekonsentrasi, atau melalui skema pendanaan lainnya guna mendukung pencapaian target nasional SPM.
2. Indikator dan target SPM perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian dengan mempertimbangkan karakteristik, kondisi geografis, serta kapasitas fiskal dan sumber daya daerah, tanpa mengurangi pencapaian target nasional secara bertahap.
3. Pemerintah Daerah perlu diberikan ruang kebijakan dalam menetapkan prioritas pelaksanaan SPM sesuai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diperlukan peningkatan komitmen pimpinan daerah dalam penerapan SPM, termasuk penguatan komitmen penganggaran yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar sebagai urusan wajib pemerintah daerah.
5. Pemerintah Daerah perlu menyusun skema pembiayaan SPM yang terintegrasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang sah serta pemisahan yang jelas antara anggaran SPM dan non-SPM untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan.
6. Perlu dilakukan penguatan sistem data, pelaporan, dan kapasitas aparatur melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan serta fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan, khususnya dalam penyusunan laporan SPM dan perhitungan kebutuhan pembiayaan.

Pada akhirnya, untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang optimal dalam berbagai sektor, termasuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional, serta penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun program relokasi pemerintah daerah, diperlukan sinergi dan kerja sama antara berbagai pihak. Dengan adanya koordinasi yang baik,

diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Demikian laporan tahunan ini disampaikan, dengan harapan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi dasar untuk peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi, khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di tahun-tahun mendatang.

FORM TAHAPAN PENERAPAN
SPM PEKERJAAN UMUM

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2025

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/ UPTD/ BADAN USAHA/ KP SPAM
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/ detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/ detik)	IDLE CAPACITY (liter/ detik)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG (SPAM Dalam Kawasan Strategis Daerah Provinsi)	KELURAHAN LASIANA	MATA AIR HITAM	KELURAHAN OESAPA	20 liter/detik	20 liter/detik		PDAM

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan
Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun
Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional
Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku
Kolom 6 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik
Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 8 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)
Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Cipta Karya,

Daniel Wilton Foenay, ST.,MT
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m³/ hari)	KK	(m³/ hari)	KK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
3										
4										
5										

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 12 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Cipta Karya,

Daniel Wilton Foenay, ST.,MT
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	JANTO N. SELAN	5371031701830008	4	1		1	
2	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	YAKOB ANDERIAS SORE	5371030905850001	10	1		1	
3	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	33	NIXON MAXI NDOLU	5371030411840009	5	1		1	
4	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	YULIUS BAYU NDAPA	5371032806690001	9	1		1	
5	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	PITER ESTON LENAMAH	5371031107890004	4	1		1	
6	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ALVARO CHRISTOMOS	5303051609870002	5		1	1	
7	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ANDERIAS BILI ROTO	5371031206780010	8	1		1	
8	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ALEXANDER LAKE	5371031505660001	4	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	GUSTAF NOME	5371031811720006	6	1		1	
10	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	HERIMUS TALAN	5371032412740003	6	1		1	
11	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	JONISUS MISSA	5371032606790008	6	1		1	
12	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	POLYCARPUS TEFA	5371032610750004	6	1		1	
13	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	YAKOBUS TOTO	5371020406840007	4	1		1	
14	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	33	GABRIEL ABI	5371030202690003	7		1	1	
15	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	YONLIF HENUKH	5371031303910008	4	1		1	
16	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	SIMON SUY	5371032103650001	5	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	YAKOB FANGGIDAE	5371030512850000	6	1		1	
18	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	ARNOLDUS DON	5371030312610000	5	1		1	
19	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	OMRIS SOINBALA	5302101310870001	4	1		1	
20	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	8	YULIANA TAGO	5312124504780003	5	1		1	
21	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	33	MARTEN TANONO	5371030503740003	8	1		1	
22	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	33	FIKTOR SNAE	5371031810820002	5	1		1	
23	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	SILVESTER LALUS	5371031511650001	8	1		1	
24	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	ALAN FAISAL	5371030606840017	4	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	3	FAREDRIK NGGEON	5371031802670001	6	1		1	
26	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	SAMUEL NGGEON	5371036201930001	4	1		1	
27	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	DICKY A. KAREL	5371032811860006	5	1		1	
28	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	IBRAHIM PELANDOU	5371032404720008	5	1		1	
29	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	PAULUS BANIK	5371032908600001	7	1		1	
30	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	HENGKI A. LEDOH	5371041507770009	4	1		1	
31	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	AGUSTINO JOSE	5371031408840000	4	1		1	
32	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	SILVESTER TAEL	5371031304640003	6	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	NIKODEMUS ADU	5371031612640001	9	1		1	
34	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	YUNUS BENU	5371032505420001	4	1		1	
35	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	YOHANES MBAU	5371032506750006	5	1		1	
36	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	YUS YONATAN MBAU	5371030907820005	4	1		1	
37	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	NATAN MANUBULU	5302201311780001	4	1		1	
38	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	ANDERIAS NDOLU	5371030404600002	3	1		1	
39	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	BOBBY D. NDOLU	5371030912860004	5	1		1	
40	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	JHONY B. MANU	5371031607830000	4	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	26	VICKY ARYANTO NDUN	5371030803940001	5	1		1	
42	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	27	WEMPI NELSON BUSU	5371032012790005	7	1		1	
43	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	ANGELINA OKI	5371032202860013	5		1	1	
44	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	GODLIF NEKEN	5371030311850000	4	1		1	
45	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	JASMIN DETHAN	5371404802231289	3		1	1	
46	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	CHRISTOFEL LITIK	5371032312590001	4	1		1	
47	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	RAFAEL NDUN	5371402409223668	6		1	1	
48	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	SAMWEL PETRA HANAS	5371035808900009	6		1	1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	DANIEL NDUN	5371031406800006	6	1		1	
50	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	YOHAN ROBINSON SUEK	5371032706800010	5	1		1	
51	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	10	4	SOLEMAN MANBAIT	5371032709650001	5	1		1	
52	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	MARTINUS TAOPAN	5371031505760002	6	1		1	
53	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	8	ELIAS MESSAKH	5371011201600001	7	1		1	
54	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	12	SERLA TAOPAN	5302011911870002	5		1	1	
55	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	9	SALIKA M. ANUNUT	5371032303820006	3		1	1	
56	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	13	39	INTO ANIN	5371031408800003	5		1	1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	ELIASAR BENU	5371032404660002	5	1		1	
58	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	LUSIA FOUK	5371036710670009	6	1		1	
59	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	DIKI KAREL	5371032206780006	4	1		1	
60	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	KLEMENS BERE NAHAK	5371030907770000	5		1	1	
61	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	30	FELENSIA BANA	5371405402218807	11	1		1	
62	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	JEANE MERIASVIN UKAT	5371042405910002	4		1	1	
63	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	JOHANSEN HELY	5371036907820003	3		1	1	
64	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	ALBERTO A. TEME	5371030202780003	8		1	1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	STELA BAUNSELE	5371032701790009	6		1	1	
66	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	10	15	MARIA FATIMA KALISTA KOA	5371032906710005	7		1	1	
67	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	DAUD LANMANI	5371033010710003	4	1		1	
68	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	EXEL J. ATAUPAH	5371404107221635	6		1	1	
69	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	11	14	JULIANTO M. TIMBUDONA	5371033112810015	5		1	1	
70	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	BERTI WAANG	5371032810880001	6		1	1	
71	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	DANIEL BILIU	5371032206620000	5	1		1	
72	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	5	ISMI KAMILA ALHUMAIRA	3322060109900001	5		1	1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	12	RAFLESIA ROHI MOLA	5371031108880002	5		1	1	
74	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	12	SILVIANA BRISIA EIREN	5371406211239543	6	1		1	
75	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	3	DOMINIKUS KIA IRI	5371032512690002	9		1	1	
76	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	6	24	SEPRIYANTO BILY	5371041009670004	6		1	1	
77	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	JONATHAN NAHAK	5371032706730003	9		1	1	
78	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	REYNARD GAVI KASE	5371030505760015	5		1	1	
79	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	4	LUKMAN A. BURHAN	5371031812990001	5	1		1	
80	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	MARSELINA SOLUK UTAN	5371036204890003	4	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	11	MARSELO BELO	5301086907880001	4		1	1	
82	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	VALENTINUS MAU/ROSALINDA MAK	5371034909680002	6	1		1	
83	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	ROSINA BINSASI	5371035110760001	7	1		1	
84	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	KRESENSIANA KOTILDIS	5371036704680001	4	1		1	
85	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	1	SUSANA ADU	5371035501580000	3	1		1	
86	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	5	19	FALDI LIU	5371030101680002	6		1	1	
87	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	5	19	ALEXANDER NDUN	5371030805830000	5	1		1	
88	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	BONNY BENYAMIN SABA	5371030504810005	6	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	ELANORA SERAN	5371031401940003	6		1	1	
90	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	CALTIN CARISA RIWU	5371406603239830	6		1	1	
91	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	YOHANIS SELAN	5371031406650003	6	1		1	
92	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	FRANS KALE TUKA	5371031404570002	4	1		1	
93	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	STEFANUS BAU SERAN	5371030205630004	8	1		1	
94	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	SOLEMAN BONBITI	5371031808560001	2	1		1	
95	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	7	28	TONI TANIU	5371030603800004	7	1		1	
96	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	2	MARTINUS PAINEON	5371036108830005	6	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	4	19	ANTONIUS KOPONG HAYONG	5371031011790012	4	1		1	
98	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	DIANA NOVITA MONE KE	5371034811790006	4	1		1	
99	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	CRISTIANO A. OBE	5371401712211257	7		1	1	
100	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	GEVARIEL SOLU	5371402602237201	4		1	1	
101	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	MARTEN NENOLIU	5371030310700000	5	1		1	
102	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	GABRIEL KLAU	5371032704570000	4	1		1	
103	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	GLYCESIA MANEK	5371406408227468	3		1	1	
104	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	31	EMPI ELIASER TANEO	5371031005910004	3	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	31	GRASANTI MONE/LAZARUS MONE	5302150511880001	4		1	1	
106	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	AMOS SERAN	5371030404740018	6	1		1	
107	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	29	HERMANUS MAU BELE	5371030904760001	6	1		1	
108	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	1	3	ANSELMUS NAHAS	5371036011950003	5	1		1	
109	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	HERRY JONI MESSAKH	5371031306630004	5	1		1	
110	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	YULIUS BILI	5371032306910000	5	1		1	
111	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	2	4	AXEL J. FALLO	5371401503234051	4		1	1	
112	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	34	YUSUF ATTY	5371030407660003	6	1		1	

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	9	32	NALDI I.R.ADU	5371041311780013	5	1		1	
114	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	9	MATEOS ADU	5371030909780012	6	1		1	
115	PENGEMBANGAN JARINGAN SPAM DI LOKASI PRIORITAS STUNTING DAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	8	31	APLONIUS LIU	5371031804770003	5	1		1	
TOTAL									**615**	**82**	**33**	**115**	

KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 : Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
Kolom 15 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Cipta Karya

Daniel Wilton Foenay, ST.,MT
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2															
3															
4															
5															
TOTAL															

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Keluarga (NIK) kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) NIK kepala keluarga
Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 10 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap wilayah (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)
Kolom 11 : Diisi dengan klasifikasi "perkotaan" atau "perdesaan" untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) (1 = resiko sanitasi rendah, 2 = resiko rendah, 3 = resiko tinggi, 4 = resiko sangat tinggi)
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMP
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari UMP
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 17 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Cipta Karya,

Daniel Wilton Foenay, ST.,MT

NIP. 19780121 200312 1 003

SPM PEKERJAAN UMUM

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	0,567	%	KELURAHAN LASIANA	Rp 1.100.000.000	DINAS PUPR PROV. NTT
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	0,567	%	KELURAHAN LASIANA	Rp 1.100.000.000	DINAS PUPR PROV. NTT

KETERANGAN :

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 2 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 3
Kolom 5 : Satuan
Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
Kolom 8 : Diisi OPD Pelaksana
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Cipta Karya,

Daniel Wilton Foenay, ST.,MT

NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	-	%	-	-	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	-	%	-	-	-

KETERANGAN :

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 2 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 3
Kolom 5 : Satuan
Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
Kolom 8 : Diisi OPD Pelaksana
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Cipta Karya,

Daniel Wilton Foenay, ST.,MT

NIP. 19780121 200312 1 003

FORM TAHAPAN PENERAPAN
SPM PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2025

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Banjir													
		Tinggi	Alor											
				Alor Barat Laut										
					Desa Aimoli									
					Desa Alaang									
					Alila									
					Alila Selatan									
					Alor Besar									
					Alor Kecil									
					Ampera									
					Bampalola									
					Dulolong									
					Dulolong Barat									
					Hulnani									
					Lefokisu									
					Lewalu									
					O A Mate									
					Otvai									
					Pulau Buaya									
					Ternate									
					Ternate Selatan									
					Kelurahan Adang									
				Alor Barat Daya										
					Halerman									
					Kafelulang									
					Kuifana									
					Manatang									
					Margeta									
					Moramam									
					Morba									
					Orgen									
					Pailelang									
					Pintu Mas									
					Probur									
					Probur Utara									
					Tribur									
					Wakapsir									
					Wakapsir Timur									
					Wolwal									
					Wolwal Barat									
					Wolwal Selatan									
					Kelurahan Moru									
				Alor Selatan										
					Kelaisi Barat									
					Kelaisi Tengah									
					Kiraman									
					Kuneman									
					Lella									
					Maikang									
					Malaipea									
					Manmas									
					Padang Alang									
					Sidabui									
					Silaipui									
					Subo									

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Tamanapui									
					Kelurahan Kelaisi Timur									
				Alor Tengah Utara										
					Alimebung									
					Dapitau									
					Fuisama									
					Fungafeng									
					Kafakbeka									
					Lakwati									
					Lembur Barat									
					Lembur Tengah									
					Likwatang									
					Manetwati									
					Nurbenlelang									
					Petleng									
					Tominuku									
					Welai Selatan									
				Alor Timur										
					Belemana									
					Elok									
					Kolana Selatan									
					Maritaing									
					Maukuru									
					Mausamang									
					Padang Panjang									
					Tanglapui									
					Tanglapui Timur									
					Kelurahan Kolana Utara									
				Alor Timur Laut										
					Air Mancur									
					Kamot									
					Kenarimbala									
					Lippang									
					Nailang									
					Pido									
					Taramana									
					Waisika									
				Kabola										
					Alila Timur									
					Kopidil									
					Lawahing									
					Pante Deera									
					Kelurahan Kabola									
				Lembur										
					Lembur Timur									
					Luba									
					Talwai									
					Tasi									
					Tulleng									
					Waimi									
				Mataru										
					Kamaifui									
					Lakatuli									
					Mataru Barat									
					Mataru Selatan									
					Mataru Timur									
					Mataru Utara									
					Taman Mataru									

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pantar										
					Bana									
					Bandar									
					Baolang									
					Bouweli									
					Bukit Mas									
					Helandohi									
					Madar									
					Munaseli									
					Pandai									
					Wailawar									
					Kelurahan Kabir									
				Pantar Barat										
					Baraler									
					Baranusa									
					Blang Merang									
					Ilu									
					Kalondama									
					Leer									
					Piringsina									
				Pantar Barat Laut										
					Allumang									
					Beangonong									
					Kalondama Barat									
					Kalondama Tengah									
					Kayang									
					Lamma									
					Marisa									
				Pantar Tengah										
					Aramaba									
					Bagang									
					Delaki									
					Eka Jaya									
					Mauta									
					Muriabang									
					Tamak									
					Toang									
					Tubbe									
					Tude									
				Pantar Timur										
					Batu									
					Bunga Bali									
					Kaera									
					Kaleb									
					Lalafang									
					Lekom									
					Mawar									
					Merdeka									
					Nule									
					Ombay									
					Treweng									
				Pulau Pura										
					Maru									
					Pura Barat									
					Pura Selatan									
					Pura Tengah									
					Pura Utara									
					Kelurahan Pura									

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pureman										
					Kailesa									
					Langkuru									
					Langkuru Utara									
					Purnama									
				Teluk Mutiara										
					Adang Buom									
					Air Kenari									
					Fanating									
					Lendola									
					Motongbang									
					Teluk Kenari									
					Kelurahan Binongko									
					Kelurahan Kalabahi Barat									
					Kelurahan Kalabahi Kota									
					Kelurahan Kalabahi Tengah									
					Kelurahan Kalabahi Timur									
					Kelurahan Mutiara									
					Kelurahan Nusa Kenari									
					Kelurahan Welai Barat									
					Kelurahan Welai Timur									
					Kelurahan Wetabua									
		Tinggi	Belu											
				Raimanuk										
					Dua Koran									
					Faturika									
					Leuntolu									
					Mandeu									
					Mandeu Raimanus									
					Rafae									
					Renrua									
					Tasain	175,61	39	44		16	23	✓	-	
					Teun									
				Tasifeto Barat										
					Bakustulama	18,96								
					Derokfaturene	11,97								
					Lawalutolus	-								
					Lookeu	-								
					Naekasa	281,38								
					Naitimu	49,89					2			
					Rinbesihat	17,96								
					Tukuneno	7,98								
				Kakuluk Mesak										
					Dualaus	114								
					Fatuketi	40								
					Jenilu	92								
					Kabuna						2			
					Kenebibi	59								
					Leosama									
					Kelurahan Fatubenao									
					Kelurahan Kota Atambua									
					Kelurahan Manumutin									
					Kelurahan Tenukiik									
				Nanaet Dubesi										
				Kota Atambua		30,93					5			
				Atambua Barat	Tula Male									
					Umanen									

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Atambua Selatan										
				Tasifeto Timur										
				Raihat										
				Lasiolat										
				Lamaknen										
				Lamaknen Selatan										
		Tinggi	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Tinggi	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang										
		Tinggi	Kab. Kupang											
				Semau										
				Kupang Barat										
				Kupang Timur										
				Sulamu										
				Kupang Tengah										
				Amarasi										
				Fatuleu										
				Takari										
				Amfoang Selatan										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Amfoang Utara										
				Nekamese										
				Amarasi Barat										
				Amarasi Selatan										
				Amarasi Timur										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfioang Barat Daya										
				Amfoang Barat Laut										
				Semau Selatan										
				Taebenu										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfoang Timur										
				Fatuleu Barat	Naitae	0,601	54	41	-	5	7	✓		
				Fatuleu Tengah										
				Amfoang Tengah										
		Tinggi	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Tinggi	Malaka											
				Malaka Barat										
				Rinhart										
				Wewiku										
				Weliman										
				Malaka Tengah										
				Sasitamean										
				Io Kufeu										
				Botin Leobele										
				Malaka Timur										
				Laen Manen										
				Kobalima										
				Kobalima Timur										
		Tinggi	Manggarai											
				Wae Rii										
				Ruteng										
				Satar Mese										
				Cibal										
				Reok										
				Langke Rembong										
				Satar Mese Barat										
				Rohong Utara										
				Lelak										
				Reok Barat										
				Cibal Barat										
				Satar Mese Utara										
		Tinggi	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeiling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Tinggi	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Tinggi	Nagekeo											
				Aesesa										
				Nangaroro										
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Tinggi	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Tinggi	Rote Ndao											
				Rote Barat Daya										
				Rote Barat Laut										
				Lobalain										
				Rote Tengah										
				Pantai Baru										
				Rote Timur										
				Rote Barat										
				Rote Selatan										
				Ndao Nuse										
				Landu Leko										
				Loaholu										
		Tinggi	Sabu Raijua											
				Sabu Barat										
				Sabu Tengah										
				Sabu Timur										
				Sabu Liae										
				Hawu Mehara										
				Raijua										
		Tinggi	Sikka											
				Paga										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok	Kota Uneng	0,806	101	38		32	20	✓		
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
		Sedang		Magepanda	Woda Mude	1,749	121	37		6	17	✓		
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										
				Doreng										
				Mapitara										
		Tinggi	Sumba Barat Daya											
				Kodi										
				Kodi Balaghar										
				Kodi Bangedo										
				Kodi Utara										
				Kota Tambolaka										
				Loura										
				Wewewa Barat										
				Wewewa Selatan										
				Wewewa Tengah										
				Wewewa Timur										
				Wewewa Utara										
		Tinggi	Sumba Tengah											
				Katikutana										
				Katikutana Selatan										
				Mamboro										
				Umbu Ratu Nggay										
				Umbu Ratu Nggay Barat										
		Tinggi	Sumba Timur											
				Kota Waingapu										
				Haharu										
				Lewa										
				Nggaha Ori Angu										
				Tabundung										
				Pinu Pahar										
				Umalulu										
				Rindi										
				Pahunga Lodu										
				Wulla Waijelu										
				Paberiwai										
				Karera										
				Kahaungu Eti										
				Matawai La Pawu										
				Kambera										
				Kambata Mapambuhang										
				Lewa Tidahu										
				Katala Hamu Lingu										
				Kanatang										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Ngadu Ngala										
				Mahu										
		Tinggi	TTS											
				Kota Soe										
				Mollo Selatan										
				Molo Utara										
				Amanuban Timur										
				Amanuban Tengah										
				Amanuban Selatan										
				Amanatun Selatan										
				Amanatun Utara										
				Kie										
				Kuanfatu										
				Fatumnasi										
				Polen										
				Batu Putih										
				Boking										
				Toianas										
				Nunkolo										
				Oenino										
				Kolbano										
				Kot'olin										
				Kualin										
				Mollo Barat										
				Kokbaun Noebana										
				Santian										
				Noebeba										
				Kuatnana										
				Fautmolo										
				Fatukopa										
				Mollo Tengah										
				Tobu										
				Nunbena										
		Tinggi	TTU											
				Miomaffo Timur										
				Miomaffo Barat										
				Biboki Selatan										
				Noemuti	Kioula	2,45	275	112	-	17	39	✓		
				Kota Kefamenanu										
				Biboki Utara										
				Biboki Anleu										
				Insana										
				Insana Utara										
				Noemuti Timur										
				Miomaffo Tengah										
				Musi										
				Mutis										
				Bikomi Selatan										
				Bikomi Tengah										
				Bikomi Niulat										
				Bikomi Utara										
				Naibenu										
				Insana Fafinesu										
				Insana Barat										
				Insana Tengah										
				Biboki Tan Pah										
				Biboki Moenleu										
				Biboki Foetleu										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tinggi	Kota Kupang											
				Alak										
				Kelapa Lima										
				Kota Raja										
				Kota Lama										
				Maulafa										
				Oebobo										
2	Cuaca Ekstrim													
		Sedang	Alor											
				Alor Barat Laut										
					Desa Aimoli									
					Desa Alaang									
					Alila									
					Alila Selatan									
					Alor Besar									
					Alor Kecil									
					Ampera									
					Bampalola									
					Dulolong									
					Dulolong Barat									
					Hulnani									
					Lefokisu									
					Lewalu									
					O A Mate									
					Otvai									
					Pulau Buaya									
					Ternate									
					Ternate Selatan									
					Kelurahan Adang									
				Alor Barat Daya										
				Alor Selatan										
				Alor Tengah Utara										
				Alor Timur										
				Alor Timur Laut										
				Kabola										
				Lembur										
				Mataru										
				Pantar										
				Pantar Barat										
				Pantar Barat Laut										
				Pantar Tengah										
				Pantar Timur										
				Pulau Pura										
				Pureman										
				Teluk Mutiara										
		Sedang	Belu											
				Raimanuk										
				Tasifeto Barat										
				Kakuluk Mesak										
				Nanaet Dubesi										
				Kota Atambua										
				Atambua Barat										
				Atambua Selatan										
				Tasifeto Timur										
				Raihat										
				Lasiolat										
				Lamaknen										
				Lamaknen Selatan										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sedang	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Sedang	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang										
		Sedang	Kab. Kupang											
				Semau										
				Kupang Barat										
				Kupang Timur										
				Sulamu										
				Kupang Tengah										
				Amarasi										
				Fatuleu										
				Takari										
				Amfoang Selatan										
				Amfoang Utara										
				Nekamese										
				Amarasi Barat										
				Amarasi Selatan										
				Amarasi Timur										
				Amabi Oefeto Timur										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Amfioang Barat Daya										
				Amfoang Barat Laut										
				Semau Selatan										
				Taebenu										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfoang Timur										
				Fatuleu Barat										
				Fatuleu Tengah										
				Amfoang Tengah										
		Sedang	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Sedang	Malaka											
				Malaka Barat										
				Rinhart										
				Wewiku										
				Weliman										
				Malaka Tengah										
				Sasitamean										
				Io Kufeu										
				Botin Leobele										
				Malaka Timur										
				Laen Manen										
				Kobalima										
				Kobalima Timur										
		Sedang	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeiling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Sedang	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Sedang	Nagekeo											
				Aesesa										
				Nangaroro										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Sedang	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Sedang	Rote Ndao											
				Rote Barat Daya										
				Rote Barat Laut										
				Lobalain										
				Rote Tengah										
				Pantai Baru										
				Rote Timur										
				Rote Barat										
				Rote Selatan										
				Ndao Nuse										
				Landu Leko										
				Loaholu										
		Sedang	Sabu Raijua											
				Sabu Barat										
				Sabu Tengah										
				Sabu Timur										
				Sabu Liae										
				Hawu Mehara										
				Raijua										
		Sedang	Sikka											
				Paga										
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok										
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
				Magepanda										
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										
				Doreng										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Mapitara										
		Sedang	Sumba Barat											
				Tana Righu										
				Loli										
				Wanokaka										
				Lamboya										
				Kota Waikabubak										
				Laboya Barat										
		Sedang	Sumba Barat Daya											
				Kodi										
				Kodi Balaghar										
				Kodi Bangedo										
				Kodi Utara										
				Kota Tambolaka										
				Loura										
				Wewewa Barat										
				Wewewa Selatan										
				Wewewa Tengah										
				Wewewa Timur										
				Wewewa Utara										
		Sedang	Sumba Tengah											
				Katikutana										
				Katikutana Selatan										
				Mamboro										
				Umbu Ratu Nggay										
				Umbu Ratu Nggay Barat										
		Sedang	Sumba Timur											
				Kota Waingapu										
				Haharu										
				Lewa										
				Nggaha Ori Angu										
				Tabundung										
				Pinu Pahar										
				Umalulu										
				Rindi										
				Pahunga Lodu										
				Wulla Waijelu										
				Paberiwai										
				Karera										
				Kahaungu Eti										
				Matawai La Pawu										
				Kambera										
				Kambata Mapambuhang										
				Lewa Tidahu										
				Katala Hamu Lingu										
				Kanatang										
				Ngadu Ngala										
				Mahu										
		Sedang	TTS											
				Kota Soe										
				Mollo Selatan										
				Molo Utara										
				Amanuban Timur										
				Amanuban Tengah										
				Amanuban Selatan										
				Amanatun Selatan										
				Amanatun Utara										
				Kie										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kuanfatu										
				Fatumnasi										
				Polen										
				Batu Putih										
				Boking										
				Toianas										
				Nunkolo										
				Oenino										
				Kolbano										
				Kot'olin										
				Kualin										
				Mollo Barat										
				Kokbaun Noebana										
				Santian										
				Noebeba										
				Kuatnana										
				Fautmolo										
				Fatukopa										
				Mollo Tengah										
				Tobu										
				Nunbena										
		Sedang	TTU											
				Miomaffo Timur										
				Miomaffo Barat										
				Biboki Selatan										
				Noemuti										
				Kota Kefamenanu										
				Biboki Utara										
				Biboki Anleu										
				Insana										
				Insana Utara										
				Noemuti Timur										
				Miomaffo Tengah										
				Musi										
				Mutis										
				Bikomi Selatan										
				Bikomi Tengah										
				Bikomi Niulat										
				Bikomi Utara										
				Naibenu										
				Insana Fafinesu										
				Insana Barat										
				Insana Tengah										
				Biboki Tan Pah										
				Biboki Moenleu										
				Biboki Foetleu										
		Sedang	Kota Kupang											
				Alak										
				Kelapa Lima										
				Kota Raja										
				Kota Lama										
				Maulafa										
				Oebobo										
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Alor											
				Alor Barat Laut										
					Desa Aimoli									
					Desa Alaang									

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Alila									
					Alila Selatan									
					Alor Besar									
					Alor Kecil									
					Ampera									
					Bampalola									
					Dulolong									
					Dulolong Barat									
					Hulnani									
					Lefokisu									
					Lewalu									
					O A Mate									
					Otvai									
					Pulau Buaya									
					Ternate									
					Ternate Selatan									
					Kelurahan Adang									
				Alor Barat Daya										
				Alor Selatan										
				Alor Tengah Utara										
				Alor Timur										
				Alor Timur Laut										
				Kabola										
				Lembur										
				Mataru										
				Pantar										
				Pantar Barat										
				Pantar Barat Laut										
				Pantar Tengah										
				Pantar Timur										
				Pulau Pura										
				Pureman										
				Teluk Mutiara										
		Rendah	Belu											
				Raimanuk										
				Tasifeto Barat										
				Kakuluk Mesak										
				Nanaet Dubesi										
				Kota Atambua										
				Atambua Barat										
				Atambua Selatan										
				Tasifeto Timur										
				Raihat										
				Lasiolat										
				Lamaknen										
				Lamaknen Selatan										
		Tinggi	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Tinggi	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang										
		Tinggi	Kab. Kupang											
				Semau										
				Kupang Barat										
				Kupang Timur										
				Sulamu										
				Kupang Tengah										
				Amarasi										
				Fatuleu										
				Takari										
				Amfoang Selatan										
				Amfoang Utara										
				Nekamese										
				Amarasi Barat										
				Amarasi Selatan										
				Amarasi Timur										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfioang Barat Daya										
				Amfoang Barat Laut										
				Semau Selatan										
				Taebenu										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfoang Timur										
				Fatuleu Barat										
				Fatuleu Tengah										
				Amfoang Tengah										
		Tinggi	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Rendah	Malaka											
				Malaka Barat										
				Rinhart										
				Wewiku										
				Weliman										
				Malaka Tengah										
				Sasitamean										
				Io Kufeu										
				Botin Leobele										
				Malaka Timur										
				Laen Manen										
				Kobalima										
				Kobalima Timur										
		Tinggi	Manggarai											
				Wae Rii										
				Ruteng										
				Satar Mese										
				Cibal										
				Reok										
				Langke Rembong										
				Satar Mese Barat										
				Rohong Utara										
				Lelak										
				Reok Barat										
				Cibal Barat										
				Satar Mese Utara										
		Tinggi	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeiling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Tinggi	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Tinggi	Nagekeo											
				Aesesa										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Nangaroro										
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Rendah	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Tinggi	Rote Ndao											
				Rote Barat Daya										
				Rote Barat Laut										
				Lobalain										
				Rote Tengah										
				Pantai Baru										
				Rote Timur										
				Rote Barat										
				Rote Selatan										
				Ndao Nuse										
				Landu Leko										
				Loaholu										
		Tinggi	Sabu Raijua											
				Sabu Barat										
				Sabu Tengah										
				Sabu Timur										
				Sabu Liae										
				Hawu Mehara										
				Raijua										
		Tinggi	Sikka											
				Paga										
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok										
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
				Magepanda										
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Doreng										
				Mapitara										
		Tinggi	Sumba Barat											
				Tana Righu										
				Loli										
				Wanokaka										
				Lamboya										
				Kota Waikabubak										
				Laboya Barat										
		Rendah	Sumba Barat Daya											
				Kodi										
				Kodi Balaghar										
				Kodi Bangedo										
				Kodi Utara										
				Kota Tambolaka										
				Loura										
				Wewewa Barat										
				Wewewa Selatan										
				Wewewa Tengah										
				Wewewa Timur										
				Wewewa Utara										
		Sedang	Sumba Tengah											
				Katikutana										
				Katikutana Selatan										
				Mamboro										
				Umbu Ratu Nggay										
				Umbu Ratu Nggay Barat										
		Tinggi	Sumba Timur											
				Kota Waingapu										
				Haharu										
				Lewa										
				Nggaha Ori Angu										
				Tabundung										
				Pinu Pahar										
				Umalulu										
				Rindi										
				Pahunga Lodu										
				Wulla Waijelu										
				Paberiwai										
				Karera										
				Kahaungu Eti										
				Matawai La Pawu										
				Kambera										
				Kambata Mapambuhang										
				Lewa Tidahu										
				Katala Hamu Lingu										
				Kanatang										
				Ngadu Ngala										
				Mahu										
		Rendah	TTS											
				Kota Soe										
				Mollo Selatan										
				Molo Utara										
				Amanuban Timur										
				Amanuban Tengah										
				Amanuban Selatan										
				Amanatun Selatan										
				Amanatun Utara										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kie										
				Kuanfatu										
				Fatumnasi										
				Polen										
				Batu Putih										
				Boking										
				Toianas										
				Nunkolo										
				Oenino										
				Kolbano										
				Kot'olin										
				Kualin										
				Mollo Barat										
				Kokbaun Noebana										
				Santian										
				Noebeba										
				Kuatnana										
				Fautmolo										
				Fatukopa										
				Mollo Tengah										
				Tobu										
				Nunbena										
		Rendah	TTU											
				Miomaffo Timur										
				Miomaffo Barat										
				Biboki Selatan										
				Noemuti										
				Kota Kefamenanu										
				Biboki Utara										
				Biboki Anleu										
				Insana										
				Insana Utara										
				Noemuti Timur										
				Miomaffo Tengah										
				Musi										
				Mutis										
				Bikomi Selatan										
				Bikomi Tengah										
				Bikomi Niulat										
				Bikomi Utara										
				Naibenu										
				Insana Fafinesu										
				Insana Barat										
				Insana Tengah										
				Biboki Tan Pah										
				Biboki Moenleu										
				Biboki Foetleu										
		Rendah	Kota Kupang											
				Alak										
				Kelapa Lima										
				Kota Raja										
				Kota Lama										
				Maulafa										
				Oebobo										
4	Gempa Bumi	Tinggi	Alor											
				Alor Barat Laut										
					Desa Aimoli									
					Desa Alaang									

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Alila									
					Alila Selatan									
					Alor Besar									
					Alor Kecil									
					Ampera									
					Bampalola									
					Dulolong									
					Dulolong Barat									
					Hulnani									
					Lefokisu									
					Lewalu									
					O A Mate									
					Otvai									
					Pulau Buaya									
					Ternate									
					Ternate Selatan									
					Kelurahan Adang									
				Alor Barat Daya										
				Alor Selatan										
				Alor Tengah Utara										
				Alor Timur										
				Alor Timur Laut										
				Kabola										
				Lembur										
				Mataru										
				Pantar										
				Pantar Barat										
				Pantar Barat Laut										
				Pantar Tengah										
				Pantar Timur										
				Pulau Pura										
				Pureman										
				Teluk Mutiara										
		Sedang	Belu											
				Raimanuk										
				Tasifeto Barat										
				Kakuluk Mesak										
				Nanaet Dubesi										
				Kota Atambua										
				Atambua Barat										
				Atambua Selatan										
				Tasifeto Timur										
				Raihat										
				Lasiolat										
				Lamaknen										
				Lamaknen Selatan										
		Sedang	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Tinggi	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang										
		Sedang	Kab. Kupang											
				Semau										
				Kupang Barat										
				Kupang Timur										
				Sulamu										
				Kupang Tengah										
				Amarasi										
				Fatuleu										
				Takari										
				Amfoang Selatan										
				Amfoang Utara										
				Nekamese										
				Amarasi Barat										
				Amarasi Selatan										
				Amarasi Timur										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfioang Barat Daya										
				Amfoang Barat Laut										
				Semau Selatan										
				Taebenu										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfoang Timur										
				Fatuleu Barat										
				Fatuleu Tengah										
				Amfoang Tengah										
		Tinggi	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Tinggi	Malaka											
				Malaka Barat										
				Rinhart										
				Wewiku										
				Weliman										
				Malaka Tengah										
				Sasitamean										
				Io Kufeu										
				Botin Leobele										
				Malaka Timur										
				Laen Manen										
				Kobalima										
				Kobalima Timur										
		Tinggi	Manggarai											
				Wae Rii										
				Ruteng										
				Satar Mese										
				Cibal										
				Reok										
				Langke Rembong										
				Satar Mese Barat										
				Rohong Utara										
				Lelak										
				Reok Barat										
				Cibal Barat										
				Satar Mese Utara										
		Sedang	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeiling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Tinggi	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Tinggi	Nagekeo											
				Aesesa										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Nangaroro										
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Tinggi	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Sedang	Rote Ndao											
				Rote Barat Daya										
				Rote Barat Laut										
				Lobalain										
				Rote Tengah										
				Pantai Baru										
				Rote Timur										
				Rote Barat										
				Rote Selatan										
				Ndao Nuse										
				Landu Leko										
				Loaholu										
		Tinggi	Sabu Raijua											
				Sabu Barat										
				Sabu Tengah										
				Sabu Timur										
				Sabu Liae										
				Hawu Mehara										
				Raijua										
		Tinggi	Sikka											
				Paga										
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok										
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
				Magepanda										
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Doreng										
				Mapitara										
		Sedang	Sumba Barat											
				Tana Righu										
				Loli										
				Wanokaka										
				Lamboya										
				Kota Waikabubak										
				Laboya Barat										
		Tinggi	Sumba Barat Daya											
				Kodi										
				Kodi Balaghar										
				Kodi Bangedo										
				Kodi Utara										
				Kota Tambolaka										
				Loura										
				Wewewa Barat										
				Wewewa Selatan										
				Wewewa Tengah										
				Wewewa Timur										
				Wewewa Utara										
		Sedang	Sumba Tengah											
				Katikutana										
				Katikutana Selatan										
				Mamboro										
				Umbu Ratu Nggay										
				Umbu Ratu Nggay Barat										
		Tinggi	Sumba Timur											
				Kota Waingapu										
				Haharu										
				Lewa										
				Nggaha Ori Angu										
				Tabundung										
				Pinu Pahar										
				Umalulu										
				Rindi										
				Pahunga Lodu										
				Wulla Waijelu										
				Paberiwai										
				Karera										
				Kahaungu Eti										
				Matawai La Pawu										
				Kambera										
				Kambata Mapambuhang										
				Lewa Tidahu										
				Katala Hamu Lingu										
				Kanatang										
				Ngadu Ngala										
				Mahu										
		Sedang	TTS											
				Kota Soe										
				Mollo Selatan										
				Molo Utara										
				Amanuban Timur										
				Amanuban Tengah										
				Amanuban Selatan										
				Amanatun Selatan										
				Amanatun Utara										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kie										
				Kuanfatu										
				Fatumnasi										
				Polen										
				Batu Putih										
				Boking										
				Toianas										
				Nunkolo										
				Oenino										
				Kolbano										
				Kot'olin										
				Kualin										
				Mollo Barat										
				Kokbaun Noebana										
				Santian										
				Noebeba										
				Kuatnana										
				Fautmolo										
				Fatukopa										
				Mollo Tengah										
				Tobu										
				Nunbena										
		Sedang	TTU											
				Miomaffo Timur										
				Miomaffo Barat										
				Biboki Selatan										
				Noemuti										
				Kota Kefamenanu										
				Biboki Utara										
				Biboki Anleu										
				Insana										
				Insana Utara										
				Noemuti Timur										
				Miomaffo Tengah										
				Musi										
				Mutis										
				Bikomi Selatan										
				Bikomi Tengah										
				Bikomi Niulat										
				Bikomi Utara										
				Naibenu										
				Insana Fafinesu										
				Insana Barat										
				Insana Tengah										
				Biboki Tan Pah										
				Biboki Moenleu										
				Biboki Foetleu										
		Sedang	Kota Kupang											
				Alak										
				Kelapa Lima										
				Kota Raja										
				Kota Lama										
				Maulafa										
				Oebobo										
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Alor											
				Alor Barat Laut										
					Desa Aimoli									
					Desa Alaang									

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Alila									
					Alila Selatan									
					Alor Besar									
					Alor Kecil									
					Ampera									
					Bampalola									
					Dulolong									
					Dulolong Barat									
					Hulnani									
					Lefokisu									
					Lewalu									
					O A Mate									
					Otvai									
					Pulau Buaya									
					Ternate									
					Ternate Selatan									
					Kelurahan Adang									
				Alor Barat Daya										
				Alor Selatan										
				Alor Tengah Utara										
				Alor Timur										
				Alor Timur Laut										
				Kabola										
				Lembur										
				Mataru										
				Pantar										
				Pantar Barat										
				Pantar Barat Laut										
				Pantar Tengah										
				Pantar Timur										
				Pulau Pura										
				Pureman										
				Teluk Mutiara										
		Sedang	Belu											
				Raimanuk										
				Tasifeto Barat										
				Kakuluk Mesak										
				Nanaet Dubesi										
				Kota Atambua										
				Atambua Barat										
				Atambua Selatan										
				Tasifeto Timur										
				Raihat										
				Lasiolat										
				Lamaknen										
				Lamaknen Selatan										
		Tinggi	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Tinggi	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang										
		Sedang	Kab. Kupang											
				Semau										
				Kupang Barat										
				Kupang Timur										
				Sulamu										
				Kupang Tengah										
				Amarasi										
				Fatuleu										
				Takari										
				Amfoang Selatan										
				Amfoang Utara										
				Nekamese										
				Amarasi Barat										
				Amarasi Selatan										
				Amarasi Timur										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfioang Barat Daya										
				Amfoang Barat Laut										
				Semau Selatan										
				Taebenu										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfoang Timur										
				Fatuleu Barat										
				Fatuleu Tengah										
				Amfoang Tengah										
		Tinggi	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Tinggi	Malaka											
				Malaka Barat										
				Rinhart										
				Wewiku										
				Weliman										
				Malaka Tengah										
				Sasitamean										
				Io Kufeu										
				Botin Leobele										
				Malaka Timur										
				Laen Manen										
				Kobalima										
				Kobalima Timur										
		Tinggi	Manggarai											
				Wae Rii										
				Ruteng										
				Satar Mese										
				Cibal										
				Reok										
				Langke Rembong										
				Satar Mese Barat										
				Rohong Utara										
				Lelak										
				Reok Barat										
				Cibal Barat										
				Satar Mese Utara										
		Tinggi	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeiling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Tinggi	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Tinggi	Nagekeo											
				Aesesa										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Nangaroro										
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Tinggi	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Tinggi	Rote Ndao											
				Rote Barat Daya										
				Rote Barat Laut										
				Lobalain										
				Rote Tengah										
				Pantai Baru										
				Rote Timur										
				Rote Barat										
				Rote Selatan										
				Ndao Nuse										
				Landu Leko										
				Loaholu										
		Tinggi	Sabu Raijua											
				Sabu Barat										
				Sabu Tengah										
				Sabu Timur										
				Sabu Liae										
				Hawu Mehara										
				Raijua										
		Tinggi	Sikka											
				Paga										
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok										
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
				Magepanda										
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Doreng										
				Mapitara										
		Tinggi	Sumba Barat											
				Tana Righu										
				Loli										
				Wanokaka										
				Lamboya										
				Kota Waikabubak										
				Laboya Barat										
		Tinggi	Sumba Barat Daya											
				Kodi										
				Kodi Balaghar										
				Kodi Bangedo										
				Kodi Utara										
				Kota Tambolaka										
				Loura										
				Wewewa Barat										
				Wewewa Selatan										
				Wewewa Tengah										
				Wewewa Timur										
				Wewewa Utara										
		Tinggi	Sumba Tengah											
				Katikutana										
				Katikutana Selatan										
				Mamboro										
				Umbu Ratu Nggay										
				Umbu Ratu Nggay Barat										
		Tinggi	Sumba Timur											
				Kota Waingapu										
				Haharu										
				Lewa										
				Nggaha Ori Angu										
				Tabundung										
				Pinu Pahar										
				Umalulu										
				Rindi										
				Pahunga Lodu										
				Wulla Waijelu										
				Paberiwai										
				Karera										
				Kahaungu Eti										
				Matawai La Pawu										
				Kambera										
				Kambata Mapambuhang										
				Lewa Tidahu										
				Katala Hamu Lingu										
				Kanatang										
				Ngadu Ngala										
				Mahu										
		Tinggi	TTS											
				Kota Soe										
				Mollo Selatan										
				Molo Utara										
				Amanuban Timur										
				Amanuban Tengah										
				Amanuban Selatan										
				Amanatun Selatan										
				Amanatun Utara										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kie										
				Kuanfatu										
				Fatumnasi										
				Polen										
				Batu Putih										
				Boking										
				Toianas										
				Nunkolo										
				Oenino										
				Kolbano										
				Kot'olin										
				Kualin										
				Mollo Barat										
				Kokbaun Noebana										
				Santian										
				Noebeba										
				Kuatnana										
				Fautmolo										
				Fatukopa										
				Mollo Tengah										
				Tobu										
				Nunbena										
		Tinggi	TTU											
				Miomaffo Timur										
				Miomaffo Barat										
				Biboki Selatan										
				Noemuti										
				Kota Kefamenanu										
				Biboki Utara										
				Biboki Anleu										
				Insana										
				Insana Utara										
				Noemuti Timur										
				Miomaffo Tengah										
				Musi										
				Mutis										
				Bikomi Selatan										
				Bikomi Tengah										
				Bikomi Niulat										
				Bikomi Utara										
				Naibenu										
				Insana Fafinesu										
				Insana Barat										
				Insana Tengah										
				Biboki Tan Pah										
				Biboki Moenleu										
				Biboki Foetleu										
		Rendah	Kota Kupang											
				Alak										
				Kelapa Lima										
				Kota Raja										
				Kota Lama										
				Maulafa										
				Oebobo										
6	Letusan Gunung Api	Rendah	Alor											
				Alor Barat Laut										
				Alor Barat Daya										
				Alor Selatan										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Alor Tengah Utara										
				Alor Timur										
				Alor Timur Laut										
				Kabola										
				Lembur										
				Mataru										
				Pantar										
				Pantar Barat										
				Pantar Barat Laut										
				Pantar Tengah										
				Pantar Timur										
				Pulau Pura										
				Pureman										
				Teluk Mutiara										
		Tinggi	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Tinggi	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang	Boru	-	206	-	-	-	-	-	-	
					Hookeng Jaya	-	415	-	-	-	-	-	-	
					Boru Kedeng	-	274	-	-	-	-	-	-	

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Nawokote	-	264	-	-	-	-	-	-	
		Tinggi	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Sedang	Manggarai											
				Wae Rii										
				Ruteng										
				Satar Mese										
				Cibal										
				Reok										
				Langke Rembong										
				Satar Mese Barat										
				Rohong Utara										
				Lelak										
				Reok Barat										
				Cibal Barat										
				Satar Mese Utara										
		Sedang	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeilling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Sedang	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Sedang	Nagekeo											
				Aesesa										
				Nangaroro										
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Tinggi	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Tinggi	Sikka											
				Paga										
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok										
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
				Magepanda										
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										
				Doreng										
				Mapitara										
7	Tanah Longsor	Tinggi	Alor											
				Alor Barat Laut										
				Alor Barat Daya										
				Alor Selatan										
				Alor Tengah Utara										
				Alor Timur										
				Alor Timur Laut										
				Kabola										
				Lembur										
				Mataru										
				Pantar										
				Pantar Barat										
				Pantar Barat Laut										
				Pantar Tengah										
				Pantar Timur										
				Pulau Pura										
				Pureman										
				Teluk Mutiara										
		Tinggi	Belu											
				Raimanuk										
				Tasifeto Barat										
				Kakuluk Mesak										
				Nanaet Dubesi										
				Kota Atambua										
				Atambua Barat										
				Atambua Selatan										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Tasifeto Timur										
				Raihat										
				Lasiolat										
				Lamaknen										
				Lamaknen Selatan										
		Tinggi	Ende											
				Detukeli										
				Detusoko										
				Ende										
				Ende Selatan										
				Ende Tengah										
				Ende Timur										
				Ende Utara										
				Kelimutu										
				Kota Baru										
				Lepembusu Kelisoke										
				Lio Timur										
				Maukaro										
				Maurole										
				Nanga Panda										
				Ndona										
				Ndona Timur										
				Ndori										
				Pulau Ende										
				Wewaria										
				Wolowaru										
				Wolojita										
		Tinggi	Flores Timur											
				Adonara										
				Adonara Barat										
				Adonara Tengah										
				Adonara Timur										
				Demon Pagong										
				Ile Boleng										
				Ile Bura										
				Ile Mandiri										
				Kelubagolit										
				Larantuka										
				Lewolema										
				Solor Barat										
				Solor Timur										
				Solor Selatan										
				Tanjung Bunga										
				Titihena										
				Witihama										
				Wotan Ulu Mado										
				Wulanggitang										
		Tinggi	Kab. Kupang											
				Semau										
				Kupang Barat										
				Kupang Timur										
				Sulamu										
				Kupang Tengah										
				Amarasi										
				Fatuleu										
				Takari	Takari	0,261	36	22	-	10	11	✓		
					Noelmina	0,162	8	8	-	6	6	✓		
				Amfoang Selatan										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Amfoang Utara										
				Nekamese										
				Amarasi Barat										
				Amarasi Selatan										
				Amarasi Timur										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfioang Barat Daya										
				Amfoang Barat Laut										
				Semau Selatan										
				Taebenu										
				Amabi Oefeto Timur										
				Amfoang Timur										
				Fatuleu Barat										
				Fatuleu Tengah										
				Amfoang Tengah										
		Tinggi	Lembata											
				Atadei										
				Buyasari										
				Ile Ape										
				Ile Ape Timur										
				Lebatukan										
				Nagawutung										
				Nubatukan										
				Omesuri										
				Wulandoni										
		Rendah	Malaka											
				Malaka Barat										
				Rinhart										
				Wewiku										
				Weliman										
				Malaka Tengah										
				Sasitamean										
				Io Kufeu										
				Botin Leobele										
				Malaka Timur										
				Laen Manen										
				Kobalima										
				Kobalima Timur										
		Rendah	Manggarai											
				Wae Rii										
				Ruteng										
				Satar Mese										
				Cibal										
				Reok										
				Langke Rembong										
				Satar Mese Barat										
				Rohong Utara										
				Lelak										
				Reok Barat										
				Cibal Barat										
				Satar Mese Utara										
		Rendah	Manggarai Barat											
				Macang Pacar										
				Kuwus										
				Lembor										
				Sano Nggoang										
				Komodo										
				Boleng										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Welak										
				Ndoso										
				Lembor Selatan										
				Mbeiling										
				Pacar										
				Kuwus Barat										
		Rendah	Manggarai Timur											
				Borong										
				Poco Ranaka										
				Lamba Leda										
				Sambi Rampas										
				Elar										
				Kota Komba										
				Rana Mese										
				Poco Ranaka Timur										
				Elar Selatan										
		Rendah	Nagekeo											
				Aesesa										
				Nangaroro										
				Boawae										
				Mauponggo										
				Wolowae										
				Keo Tengah										
				Aesesa Selatan										
		Rendah	Ngada											
				Aimere										
				Golewa										
				Bajawa										
				Soa										
				Riung										
				Jerebu										
				Riung Barat										
				Bajawa Utara										
				Wolomeze										
				Golewa Selatan										
				Golewa Barat										
				Inerie										
		Rendah	Rote Ndao											
				Rote Barat Daya										
				Rote Barat Laut										
				Lobalain										
				Rote Tengah										
				Pantai Baru										
				Rote Timur										
				Rote Barat										
				Rote Selatan										
				Ndao Nuse										
				Landu Leko										
				Loaholu										
		Rendah	Sabu Raijua											
				Sabu Barat										
				Sabu Tengah										
				Sabu Timur										
				Sabu Liae										
				Hawu Mehara										
				Raijua										
		Rendah	Sikka											
				Paga										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Mego										
				Lelak										
				Nita										
				Alok										
				Palue										
				Nelle										
				Talibura										
				Waigete										
				Kewapante										
				Bola										
				Magepanda										
				Waiblama										
				Alok Barat										
				Alok Timur										
				Koting										
				Tanawawo										
				Hewokloang										
				Kangae										
				Doreng										
				Mapitara										
		Rendah	Sumba Barat											
				Tana Righu										
				Loli										
				Wanokaka										
				Lamboya										
				Kota Waikabubak										
				Laboya Barat										
		Rendah	Sumba Barat Daya											
				Kodi										
				Kodi Balaghar										
				Kodi Bangedo										
				Kodi Utara										
				Kota Tambolaka										
				Loura										
				Wewewa Barat										
				Wewewa Selatan										
				Wewewa Tengah										
				Wewewa Timur										
				Wewewa Utara										
		Rendah	Sumba Tengah											
				Katikutana										
				Katikutana Selatan										
				Mamboro										
				Umbu Ratu Nggay										
				Umbu Ratu Nggay Barat										
		Rendah	Sumba Timur											
				Kota Waingapu										
				Haharu										
				Lewa										
				Nggaha Ori Angu										
				Tabundung										
				Pinu Pahar										
				Umalulu										
				Rindi										
				Pahunga Lodu										
				Wulla Waijelu										
				Paberiwai										
				Karera										

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kahaungu Eti										
				Matawai La Pawu										
				Kambera										
				Kambata Mapambuhang										
				Lewa Tidahu										
				Katala Hamu Lingu										
				Kanatang										
				Ngadu Ngala										
				Mahu										
		Rendah	TTS											
				Kota Soe										
				Mollo Selatan										
				Molo Utara										
				Amanuban Timur										
				Amanuban Tengah										
				Amanuban Selatan										
				Amanatun Selatan										
				Amanatun Utara										
				Kie										
				Kuanfatu										
				Fatumnasi										
				Polen										
				Batu Putih										
				Boking										
				Toianas										
				Nunkolo										
				Oenino										
				Kolbano										
				Kot'olin										
				Kualin										
				Mollo Barat										
				Kokbaun Noebana										
				Santian										
				Noebeba										
				Kuatnana										
				Fautmolo										
				Fatukopa										
				Mollo Tengah										
				Tobu										
				Nunbena										
		Rendah	TTU											
				Miomaffo Timur										
				Miomaffo Barat										
				Biboki Selatan										
				Noemuti	Kioula	2,45	275	112	-	17	39	✓		
				Kota Kefamenanu										
				Biboki Utara										
				Biboki Anleu										
				Insana										
				Insana Utara										
				Noemuti Timur	Naob	0,137	22	16	-	4	9	✓		
				Miomaffo Tengah										
				Musi										
				Mutis										
				Bikomi Selatan										
				Bikomi Tengah										
				Bikomi Niulat										
				Bikomi Utara										

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)		KETERANGAN
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Naibenu										
				Insana Fafinesu										
				Insana Barat										
				Insana Tengah										
				Biboki Tan Pah										
				Biboki Moenleu										
				Biboki Foetleu										
		Tinggi	Kota Kupang											
				Alak										
				Kelapa Lima										
				Kota Raja										
				Kota Lama										
				Maulafa										
				Oebobo										
Total *)														

KETERANGAN :

Kolom 1	:	Diisi nomor urut
Kolom 2	:	Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longgsor.
kolom 3	:	Diisi " rendah / sedang / tinggi " sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
kolom 4	:	Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 5	:	Diisi nama Kecamatan
Kolom 6	:	Diisi nama kelurahan/ Desa
Kolom 7	:	Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
Kolom 8	:	Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
Kolom 9	:	Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
kolom 10	:	Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 11	:	Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 12	:	Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 13	:	Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 14	:	Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 15	:	Diisi Keterangan
*)	:	Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 7 s. d 14

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Alor	-	-	-	-	AKAN BERSURAT KE KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGECEK LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
2	Belu					
3	Ende					
4	Flores Timur					
5	Kab. Kupang					
6	Lembata					
7	Malaka					
8	Manggarai					
9	Manggarai Barat					
10	Manggarai Timur					
11	Nagekeo					
12	Ngada					
13	Rote Ndao					
14	Sabu Raijua					
15	Sikka					
16	Sumba Barat					
17	Sumba Barat Daya					
18	Sumba Tengah					
19	Sumba Timur					
20	TTS					
21	TTU					
22	Kota Kupang					

KETERANGAN :

Kolom 1	:	Diisi nomor urut
Kolom 2	:	Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 3	:	Diisi nama Kecamatan
kolom 4	:	Diisi nama kelurahan/ Desa
Kolom 5	:	Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 6	:	Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 7	:	Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KETERANGAN
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banjir Bandang	2021	Belu	Raimanuk	23	2	7	14	23			
				Kakuluk Mesak	2	0	1	1	2			
				Nanaet Duabesi	1	0	0	1	1			
				Lamaknen Selatan	5	0	5	0	5			
				Kota Atambua	5	0	0	5	5			
				Tasifeto Barat	2	0	1	1	2			
2	Banjir Bandang	2023	Belu	Atambua Barat	8	6	1	1	8			
				Kota Atambua	10	1	2	7	10			
				Tasifeto Timur	7	0	1	6	7			
				Lamaknen Selatan	129	46	21	62	129			
				Lamaknen	24	10	3	11	24			
3	Siklon Tropis Seroja	2021	Flores Timur	Kluba Golit	5	3	1	1	5			
				Adonara Barat	31	15	3	13	31			
				Adonara	18	0	0	18	18			
				Adonara Tengah	7	5	1	1	7			
				Wotan Ulumado	6	4	1	1	6			
				Ile Boleng	32	15	1	16	32			
				Adonara Timur	54	40	6	8	54			
4	Banjir Bandang, Tanah Longsor, ROB dan Angin Kencang	2021	Flores Timur	Ile Boleng	55	0	0	55	55			
				Adonara Timur	188	0	0	188	188			
				Wotan Ulumado	50	0	0	50	50			
5	Erupsi Gunung Lewtobi Laki-laki	2024	Flores Timur	Wulang Gitang	1159	274	0	885	1159			
				Ilebura	794	0	0	794	794			
6	Banjir Bandang	2021	Lembata	Ile Ape	354	112	91	151	354			
				Ile Ape Timur	120	50	2	68	120			
				Omesuri	74	46	6	22	74			
				Buyasuri	46	12	9	25	46			
				Lebatukan	70	35	11	24	70			
7	Banjir Rob	2025	Sikka	Alok	67	64	0	3	67			
8	Banjir	2025	Sikka	Magepanda	26	26	0	0	26			
9	Banjir & Longsor	2025	TTU	Noemuti	112	105	0	7	112			
10	Longsor (Tanah Gerak)	2025	TTU	Noemuti Timur	13	4	0	9	13			
11	Banjir	2025	Kab. Kupang	Fatuleu Barat	54	32	8	14	54			
12	Longsor	2023 & 2025		Takari	9	0	0	9	9			
13	Longsor	2023 & 2025		Takari	1	0	0	1	1			
					Total *)	907	182	2472				

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi , seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longgsor

kolom 3	:	Diisi tahun terjadinya bencana
kolom 4	:	Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 5	:	Diisi nama Kecamatan
Kolom 6	:	Diisi jumlah rumah rusak
Kolom 7	:	Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30 %
Kolom 8	:	Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30 % - 45 %
Kolom 9	:	Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45 %
kolom 10	:	Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 11	:	Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 12	:	Diisi jumlah rumah tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 13	:	Diisi Keterangan
*)	:	Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s. d 12

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KAWASAN PEMGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)		KETERANGAN
		KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BELUM ADA PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI YANG BERAKIBAT PADA RELOKASI
Total *)												

KETERANGAN :

Kolom 1	:	Diisi nomor urut
Kolom 2	:	Diisi Nama kawasan pengembangan
kolom 3	:	Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4	:	Diisi nama Kecamatan
Kolom 5	:	Diisi Nama Kelurahan/ Desa
Kolom 6	:	Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 7	:	Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Kolom 8	:	Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Kolom 9	:	Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyrakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
kolom 10	:	Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyrakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 11	:	Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 12	:	Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
Kolom 13	:	Diisi Keterangan
*)	:	Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s. d 12

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 Ha)

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/ sedang/ berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Timor Tengah Selatan	Kota Soe	Nonohonis RT.004/RW.007	13,96	80	-	Ringan	-
2	Timor Tengah Selatan	Kota Soe	Nonohonis RT.020/RW.002	10,73	39		Ringan	

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/ Kota

kolom 3 : Diisi nama Kecamatan

kolom 4 : Diisi Nama Kelurahan/ Desa

Kolom 5 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 6 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10 - 15 Ha dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 7 : Diisi Jumah KK yang berada di kawasan Kumuh 10 - 15 Ha

Kolom 8 : Diisi " ringan/ sedang/ berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018

Kolom 9 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha														
3	Pengembangan perumahan baru skla besar melalui penyediaan akses														
Total *)															

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yangtidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
Kolom 16 : Diisi dengan Keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s. d 15

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. B. 1 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM	KETERANGAN
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/PEMBANGUNAN BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum dapat melakukan perhitungan kebutuhan karena belum melakukan idetifikasi
Total *)																										

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang akan terjadi, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longgsor
kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 6 : Diisi nama kelurahan/ Desa
Kolom 7 : Diisi nama RW
Kolom 8 : Diisi nama RT
Kolom 9 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
kolom 10 : Diisi Nama KK dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 KK,cukup diisi satu nama KK
Kolom 11 : Diisi nomor induk kependudukan (NIK) KK
Kolom 12 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30 %
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30 % - 45%
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan Kembali
Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 25 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
Kolom 26 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
Kolom 27 : Diisi dengan keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. B. 2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
A.	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)	
	1.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
			1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang *Hari	
			2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang *Hari	
			Survei Primer	Rp (Sub Total)	
			1. Pemetaan	Orang *Hari	
	2.	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
			1. Data Aset lahan Pemda	Orang *Hari	
			2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang *Hari	
			Survei Primer	Rp (Sub Total)	
			1. Pemetaan	Orang *Hari	
	3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelum yang belum tertangani	Rp (Sub Total)	
	4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi			Rp (Sub Total)	
	1.	Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang *Kali	
			Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
			ATK	LS	
			Narasumber	Orang *Kali	
C.	Pembentukan Tim Satgas			Rp (Biaya C1)	
	1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
			ATK	LS	
			Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	
D.	Pendataan Cepat			Rp (Sub Total)	
	1.	Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang *Hari	
			penggandaan Form	Eks	
			Pengolahan Data	Orang *Hari	
E.	Verifikasi penerimaan layanan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Rembung warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			penggandaan Materi	Eks	
F.	Penyusunan rencana Aksi			Rp (Sub Total)	
	1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
			penggandaan Materi	Eks	
			ATK	LS	
G.	Rehabilitasi Rumah			Rp (Sub Total)	
	1.	Pembentukan Tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang *Bulan	
	2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			penggandaan Materi	Eks	
	3.	Pelaksanaan Rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp	
H.	Pembangunan Kembali			Rp (Sub Total)	
	1.	Pembentukan Tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang *Bulan	
	2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			penggandaan Materi	Eks	
	3.	Penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembung Desa	Rp (Sub Total)	
			1. Media Diskusi	Rp	
			2. Transportasi	Orang *Kali	
			3. Konsumsi Rapat	Orang *Kali	
I.	Pembangungan Baru/relokasi korban bencana			Rp (Sub Total)	
	1.	Pengadaan Lahan	Pembebasan lahan	Rp	
	2.	Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rembung warga	Rp (Sub Total)	
			1. Media Diskusi	Rp	
			2. Transportasi	Orang *Hari	
			3. Konsumsi Rapat	Orang *Kali	
			Tenaga Ahli	Rp	
			5. tenaga ahli perencana	Orang *Bulan	
			6. tenaga ahli arsitektur	Orang *Bulan	
			7. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang *Bulan	
			8. Tenaga Ahli ME	Orang *Bulan	
			9. Tenaga ahli plumbing	Orang *Bulan	
	3.	Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp	
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Penyusunan Laporan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Narasumber/ praktisi	Orang *Kali	
			penggandaan Dokumen laporan	Eks	
K.	Pembinaan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Praktisi/narasumber	Orang *Kali	

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*		*3*	*4*	*5*
			penggandaan Dokumen laporan	Eks	
L.	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem Informasi	Rp	
	2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana Update Data Kinerja	Orang *Kali	
			Survei Lapangan	Orang *Kali	
M.	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Rapat Evaluasi Penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Praktisi/narasumber	Orang *Kali	
			penggandaan Dokumen laporan	Eks	

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. B. 5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M^2)	LUAS TANAH (M^2)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			KETERANGAN
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha																					
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses																					
Total *)																						

KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi program yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/ Desa
Kolom 6 : Diisi nama RW
Kolom 7 : Diisi nama RT
Kolom 8 : Diisi Nama KK dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 KK,cukup diisi satu nama KK
Kolom 9 : Diisi nomor induk kependudukan (NIK) KK
kolom 10 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 13 : Diisi Luas Bangunan dalam satuan M^2
Kolom 14 : Diisi Luas Tanah dalam satuan M^2
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 23 : Diisi dengan keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. B. 6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.		KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1.	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)	Belum melakukan perhitungan kebutuhan layanan pemenuhan rumah layak huni karena terkendala keterbatasan fiskal daerah
	1.	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survei Sekunder :		
			Pengadaan peta	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	2.	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survei Sekunder :		
			Pengadaan peta	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	3.	Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun Umum dan atau Rumah Khusus Eksisting	Survei Sekunder :		
			Koordinasi dengan Instansi terkait (PTSP)	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	4.	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:		
			Tenaga Ahli Geografi/ Geodesi	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Statistik	Orang *Bulan	
2.	Sinkronisasi Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota				
	1.	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Singkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		
			Paket Meeting	Orang *Kali	
	2.	Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket Meeting	Orang *Kali	
3.	Pembinaan Masyarakat terkait relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
	1.	Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan Rencana Relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi		
			Penggandaan media Publikasi (leaflet dan booklet)	Eks	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	2.	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi		
			Penggandaan media Publikasi (leaflet dan booklet)	Eks	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
4.	Penyusunan Rencana pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi				
	1.	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi		
			Penggandaan Formulir	Eks	
			ATK	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rembung Warga		
			Media Diskusi	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
			Penggandaan Dokumen	Eks	
5.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan			Rp (Sub Total)	
	1.	Verifikasi penerimaan pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi		
			Penggandaan Formulir	Eks	
			ATK	Rp	

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	2.	Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau bangunan	Penyelenggara Sosialisasi		
			Penggandaan media Publikasi (leaflet dan booklet)	Eks	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	3.	Pendampingan Teknis perhitungan Appraisal Aset properti	pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan Appraisal aset properti		
			Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang *Bulan	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	4.	Sosialisasi Pengembangan perumahan Baru dan Mekanisme Akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi		
			Penggandaan media Publikasi (leaflet dan booklet)	Eks	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
6.	Subsidi Uang Sewa				
	1.	Verifikasi penerimaan pelayanan Subsidi Uang Sewa	Penyelenggaraan Verifikasi		
			Penggandaan Formulir	Eks	
			ATK	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	2.	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa layak huni		
			Konsumsi	Orang *Kali	
	3.	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran subsidi uang sewa		
			Total Subsidi uang Sewa	Rp	
			Penggandaan Dokumen	Eks	
7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni			Rp (Sub Total)	
	1.	Verifikasi penerimaan pelayanan penyediaan Rumah Layak Huni	Penyelenggaraan Verifikasi		
			Penggandaan Formulir	Eks	
			ATK	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	2.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembung Warga		
			Media Diskusi	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
			Tenaga Ahli		
			Tenaga Ahli Perencana	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Arsitek	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli ME	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Plumbing	Orang *Bulan	
	3.	Perjanjian Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Rembung Warga		
			Media Diskusi	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	4.	Pembangunan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan Fisik Rumah Susun		
			Biaya Konstruksi	Rp	
			Biaya MK	Rp	
	5.	Penghunian Rumah Susun dan/ atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah		

NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
			Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP *Bulan	
			Penggandaan Dokumen	Eks	
8.	Pelaporan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Penyusunan Laporan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Penggandaan Dokumen Laporan	Eks	
9.	Pembinaan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota, Sektor Swasta, dan Masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan		
			Pembahasan (paket meeting)	Orang *Hari	
			Penggandaan Dokumen Laporan	Eks	
			Praktisi/narasumber	Orang *Kali	
10.	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Perangkat Pemantauan SPM	Penggandaan Sistem Informasi	Rp	
	2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana Update Data Kinerja	Orang *Kali	
			Survei Lapangan	Orang *Kali	
11.	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Evaluasi Penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi	Eks	
			Narasumber	Orang *Kali	

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. C. 1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									KETERANGAN
				TAHUN KE-1			TAHUN KE- 2			TAHUN KE- 3			
				ABPD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Kembali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Rumah Relokasi												
	a. Pengadaan Lahan												
	b. Pembangunan Baru												
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana												
Jumlah *)													

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Kegiatan Layanan Diisi sesuai dengan Form 4. B. 1 pada kolom 21 s.d. 24
kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan
kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke - 1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke - 1
Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke - 1
Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke - 2
Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke - 2
kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke - 2
Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke - 3
Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke - 3
Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke - 3
Kolom 14 : Diisi dengan Keterangan
*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. C. 3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN TAHUN N + 1			KETERANGAN
				ABPD	DAK	LAINNYA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-	-	
2	Penyediaan rumah Layak Huni	-	-	-	-	-	
Jumlah *)							

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan

kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun N + 1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun N + 1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun N + 1

Kolom 8 : Diisi dengan Keterangan

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. D. 1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN - N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI					KETERANGAN
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total *)																	
Persentase Layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang akan terjadi, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longgsor
kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 5 : Diisi total rumah rusak
Kolom 6 : Diisi total jumlah Rusak ringan
Kolom 7 : Diisi total jumlah Rusak sedang
Kolom 8 : Diisi total jumlah Rusak berat
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan Kembali
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan Relokasi
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan Subsidi uang sewa
Kolom 13 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 14 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 15 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 16 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Subsidi uang sewa
Kolom 17 : Diisi target jumlah rumah yang belum terlayani
Kolom 18 : Diisi dengan keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. D. 3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN - N
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total *)													
Persentase Layanan **)													
Capaian SPM Total ***)													

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan program relokasi yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Desa/Kelurahan
Kolom 6 : Diisi total rumah yang terkena program relokasi
Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan ganti aset
Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
kolom 10 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Ganti aset
Kolom 11 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Subsidi Sewa
Kolom 12 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang belum terlayani
Kolom 14 : Diisi dengan keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005

FORM 4. E. 1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REALISASI			KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana	-	-	-	-	-
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-

KETERANGAN :

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

Kolom 6 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUCE FANGIDAE, ST., M.Si
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19750512 200012 1 005